

KONSEP FINANCIAL STATEMENT FRAUD

Dr. Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si, AK, CA
Rina Tjandrakirana, S.E., M.Si, AK, CA
Abukosim, S.E., M.M., Ak



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

**Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KONSEP FINANCIAL STATEMENT FRAUD

Penulis : Dr. Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si, AK, CA
Rina Tjandrakirana, S.E., M.Si, AK, CA
Abukosim, S.E., M.M., Ak

Layout : Nyimas Amrina Rosyada

Desain Cover : Ismoko

Hak Penerbit pada **Noer Fikri Offset**
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:
CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp : (0711) 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : Januari 2023
16,25 x 25 cm
vi, 62 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN : 978-623-178-056-0

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku monograf yang berjudul “Konsep Financial Statemnet Fraud”.

Buku monograf ini bertujuan sebagai tambahan referensi bagi para akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang “Konsep Financial Statemnet Fraud”.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan buku monograf, maka sangat dibutuhkan kritik dan saran demi kesempurnaan. Terakhir, semoga buku monograf ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I. Teori Konsep <i>Financial Statement Fraud</i>	1
1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	1
1.2 <i>Cognitive Dissonance Theory</i>	3
1.3 Teori <i>Fraud Triangle</i>	3
1.4 Teori <i>Fraud Diamond</i>	3
1.5 <i>Fraud</i>	7
1.6 Kecurangan Laporan Keuangan	9
1.7 <i>Fraud Triangle Theory</i>	10
1.8 <i>Fraud Diamond Theory</i>	11
1.9 <i>Fraud Pentagon Theory</i>	13
1.10 <i>Fraud Hexagon Theory</i>	14
BAB II. <i>Financial Target</i>	19
2.1 <i>Financial Targets</i>	19
2.2 <i>Ineffective Monitoring</i>	20
2.3 <i>Change in Auditor</i>	21
2.4 Pergantian Direksi Perusahaan terhadap <i>Financial Statement Fraud</i>	22
2.5 <i>Financial Statement Fraud</i>	23
2.6 Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan	24
BAB III. Peran CEO dalam Laporan Keuangan	29
3.1 <i>Frequent Number of CEO's Picture</i>	29
3.2 Ikatan Politik dengan Politisi atau Pemerintah	29
BAB IV. Kepatuhan Auditor Berdasarkan <i>International Standard Auditing</i>	33
4.1 Kepatuhan Auditor	33
4.2 <i>International Standards on Auditing (ISA)</i>	35

BAB V. Prosedur Audit	47
5.1 Standar Pekerjaan lapangan	47
5.2 Perilaku <i>Premature Sign Off</i>	50
5.3 <i>Time Pressure</i>	51
5.4 Risiko Audit	52
5.5 Materialitas.....	53
5.6 Prosedur <i>Review</i> dan Kontrol Kualitas oleh Kantor Akuntan Publik.....	56
5.7 <i>Locus of Control Auditor</i>	57
Daftar Pustaka.....	60

BAB I

TEORI KONSEP *FINANCIAL STATEMENT FRAUD*

1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory menggambarkan hubungan antara pemegang saham yang bertindak sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agen*. *Agen* adalah pihak yang diberi kewenangan oleh *principal* guna bekerja demi kepentingan *principal*, yang menjadikan *agen* harus mempertanggung jawabkan semua pekerjaannya kepada *principal*.

Dalam teori keagenan, baik *principal* maupun *agen* memiliki kepentingannya masing-masing. Meningkatkan kinerja keuangan perusahaan berupa *return on investment* yang tinggi merupakan hal yang menarik bagi *principal*, dan selanjutnya *principal* memberikan nilai tambah kepada *agen* berupa kompensasi finansial dan syarat-syarat yang melekat pada hubungan tersebut.

Eisenhardt (1989) mengkategorikan teori agensi dengan tiga asumsi sifat manusia, yaitu: (1) Mementingkan dirinya sendiri (*self-interest*), (2) Manusia memiliki pemikiran terbatas mengenai persepsi masa depan (*bounded rationality*), dan (3) Manusia cenderung menghindari risiko (*risk aversion*). Sifat tersebut menyebabkan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang dikenal sebagai informasi asimetris atau *asymmetric information*. Hal tersebut memberikan peluang (*opportunity*) kepada manajer untuk mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan pemilik, yaitu dengan mentransfer kemakmuran pemilik kepada dirinya sendiri atau *self interest* (Haryono, 2005). *Agen* akan berusaha mencari keuntungan sendiri untuk mendapatkan bonus dari perusahaan dengan memanipulasi angka- angka di laporan keuangan.

Dengan adanya hal tersebut, praktik pelaporan keuangan sering menimbulkan konflik antara *principal* dan *agent* karena tidak adanya laporan keuangan yang transparan sehingga akan menjadi penghalang dalam mewujudkan praktik *Good Corporate Governance (GCG)*, yang mana salah satu prinsip dari *GCG* adalah transparansi.

Berdasarkan teori keagenan yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa konflik keagenan disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara *agen* dan *principal*, serta adanya

asimetri informasi (information asymmetry) yang terdiri dari adverse selection dan moral hazard.

Manajemen sebagai agen diberikan kekuasaan dalam manage dan membuat keputusan yang terbaik bagi kepentingan prinsipal dan perusahaan. Bentuk tanggungjawab agen diimplikasikan dalam laporan keuangan perusahaan dan laporan manajerial. Pentingnya informasi yang ada pada laporan tersebut mendorong manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan tujuan untuk memuaskan beberapa pihak, khususnya prinsipal. Dengan demikian dengan adanya permasalahan tersebut terkadang manajemen rela melakukan kecurangan agar informasi dalam laporan keuangan terlihat baik dan dapat membantu agen dalam memenuhi kepentingannya.

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen akan menimbulkan benturan kepentingan antara keduanya, benturan kepentingan ini membuat agen menanggung tekanan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan berharap *principal* akan memberikan apresiasi (rasionalisasi). Peluang untuk meningkatkan keuntungan adalah pintu awal sebuah penipuan (peluang) yang lebih terbuka. Sejalan dengan tingginya pengembalian investasi yang diperoleh *principal*, kompensasi yang diberikan kepada agen juga semakin tinggi.

Dalam perekonomian modern, pengelolaan perusahaan dipisahkan dari kepemilikan pribadi. Hal ini sejalan dengan agency theory yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional (agen/manajer). Tujuan pemisahan pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan memiliki sumber daya manusia yang profesional dalam mencapai tujuan tersebut. Faiz Rahman Siddiq dan Sofyan Hadinata 102 Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Para tenaga profesional (agen/manajer), bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai agents-nya pemegang saham. Semakin besar profit yang didapatkan perusahaan maka semakin besar pula bonus yang didapatkan agen. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas

mengawasi jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan (Sutedi, 2011: 13).

1.2 Cognitive Dissonance Theory

Tiller (1983) dalam Birnberg, Jacob G (2007) menjelaskan bahwa teori ini memprediksi ketika individu sudah memilih tujuan, misalnya tujuan anggaran dan representasi mental sebagai pilihan yang baik. Dengan tujuan tersebut, mereka termotivasi untuk mencapai tujuan yang tidak hanya oleh imbalan yang didapat, tetapi juga karena sebuah tujuan yang konsisten dengan representasi mental positif yang telah dipilih. Teori ini menunjukkan bahwa ketika seseorang sudah memiliki tujuan yang positif, maka dia tidak akan terusik dengan tindak kecurangan. Organisasi atau perusahaan dengan anggota yang memiliki tujuan seperti ini maka akan mengurangi resiko sebuah perusahaan untuk melakukan kecurangan. Kelompok orang seperti ini akan tetap pada tujuan positifnya meskipun ada tekanan, tujuan, alasan yang rasional bahkan memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan kecurangan.

1.3 Teori Fraud Triangle

Cressey (1953) dalam Skousen *et al.* (2009) menyatakan bahwa teori faktorrisiko kecurangan berdasar pada hasil wawancara yang telah banyak dilakukan pada orang-orang yang dihukum atas tindak penggelapan atau korupsi. Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa kecurangan terjadi dengan diikuti tiga ciri. Pertama, pihakterpidana memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan. Kedua, individu *Fraud triangle* menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud* yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai tiga poin ini akan dijelaskan di elemen-elemen *fraud diamond*.

1.4 Teori Fraud Diamond

Wolfe dan Hermanson (2004) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian kecurangan perlu mempertimbangkan elemen keempat. Di samping *pressure*,

opportunity, dan *rationalization*, juga harus dipertimbangkan pula unsur *individual's capability* (kemampuan individu). *Capability* merupakan sifat-sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama dalam kecurangan yang mungkin benar-benar terjadi bahkan dengan kehadiran tiga unsur lainnya. Keempat elemen ini dikenal sebagai “*Fraud Diamond*” (Wolfe dan Hermanson, 2004).

Wolfe dan Hermanson (2004) juga menjelaskan sifat-sifat terkait elemen *capability* yang sangat penting dalam pribadi pelaku kecurangan, yaitu:

1. *Positioning* (Posisi seseorang)

Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Seseorang yang memiliki otoritas, juga memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan.

2. *Intelligence and creativity* (Intelegensi dan kreatifitas)

Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar.

3. *Convidence/Ego* (Kepercayaan diri/ego)

Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri (narsisme). Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, gangguan kepribadian narsisme meliputi kebutuhan untuk dikagumi dan kurangnya empati untuk orang lain. Individu dengan gangguan ini percaya bahwa mereka lebih unggul dan cenderung ingin memperlihatkan prestasi dan kemampuan mereka.

4. *Coercion* (Paksaan)

Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain.

5. *Deceit* (Penipuan)

Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu

berbohong meyakinkan, dan harus melacak cerita secara keseluruhan.

6. *Stress*

Individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres.

1.4.1 Elemen *Fraud Diamond*

1.4.1.1 Tekanan

Elemen tekanan sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keagenan. Jika ditelusur, pihak agen akan memberikan tekanan kepada manajemen untuk memberikan kinerja yang terbaik. Kategori tekanan bisa bermacam-macam seperti tekanan keuangan, tekanan akan kebiasaanburuk, dan tekanan yang berhubungandenganpekerjaan (Albrecht *et al.*, 2011). Tekanan-tekanantersebut dapat memicumajemen untuk melakukan kecurangandalamlaporankeuangan. Tekanan (*pressure*) dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non keuangan. Moeller (2004:222) dalam bukunya berpendapat bahwa tekanan situasional berpotensi muncul karena beberapa alasan, antara lain:

- a. Adanya kewajiban keuangan yang melebihi batas kemampuan yang harus diselesaikan oleh pegawai atau manajemen.
- b. Terjadinya kegagalan hubungan kerja antara perusahaan dengan pegawainya baik yang berkenaan dengan akses atau penggunaan aktiva perusahaan.
- c. Kompensasi yang tidak sesuai dengan harapan.
- d. Jenjang karier, promosi, dan masa depan pegawai di perusahaan tersebut tidak jelas.

Albrecht *et al.* (2011) menjelaskan bahwa tekanan dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu:

1. Tekanan Finansial (*Financial Pressures*)

Tekanan finansial yang sering diselesaikan dengan mencuri (*Fraud*) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu keserakahan (*greedy*), standar hidup yang terlalu tinggi (*living beyond one's means*), banyaknya tagihan dan utang (*high bills or personal debt*), kredit yang hampir jatuh tempo (*poor credit*), dan kebutuhan hidup yang tidak terduga (*unexpected financial needs*)

2. Tekanan akan Kebiasaan Buruk (*Vices Pressures*)

Vices Pressures disebabkan oleh dorongan untuk memenuhi kebiasaan yang buruk, misalnya berhubungan dengan: judi, obat-obat terlarang, alkohol, dan barang-barang mahal yang sifatnya negatif. Sebagai contoh, seseorang yang suka berjudi akan terdorong untuk melakukan apapun untuk memperoleh uang sebagai taruhan (*gambling*).

3. Tekanan yang Berhubungan dengan Pekerjaan (*Work-Related Pressures*)

Tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh karyawan, misalnya kurangnya perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan, dan sebagainya, dapat membuat karyawan harus melakukan *Fraud* untuk memperoleh “imbalan” atas kerja kerasnya.

ACFE sebagai lembaga independen yang berfokus pada *fraud* melakukan sebuah *study* terhadap beberapa responden terkait dengan *behavioral red flags*. Perilaku yang menyebabkan terjadinya *red flag* paling banyak terjadi karena kehidupan glamor dan hedon yaitu sebesar 45,8%. Kemudian disusul dengan kesulitan keuangan sebesar 30%, terdapat asosiasi dengan vendor atau dengan pelanggan, dan beberapa alasan lainnya.

Dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (Albrecht *et al.*, 2011). Tekanan- tekanan tersebut dapat memicukan manajemen untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Tekanan (*pressure*) dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non keuangan. Moeller (2004:222) dalam bukunya berpendapat bahwa tekanan situasional berpotensi muncul karena beberapa alasan, antara lain:

- a. Adanya kewajiban keuangan yang melebihi batas kemampuan yang harus diselesaikan oleh pegawai atau manajemen.
- b. Terjadinya kegagalan hubungan kerja antara perusahaan dengan pegawainya baik yang berkenaan dengan akses atau penggunaan aktiva perusahaan.
- c. Kompensasi yang tidak sesuai dengan harapan.
- d. Jenjang karier, promosi, dan masa depan pegawai di perusahaan tersebut tidak jelas.

Albrecht *et al.* (2011) menjelaskan bahwa tekanan dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu:

4. Tekanan Finansial (*Financial Pressures*)

Tekanan finansial yang sering diselesaikan dengan mencuri (*Fraud*) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu keserakahan (*greedy*), standar hidup yang terlalu tinggi (*living beyond one's means*), banyaknya tagihan dan utang (*high bills or personal debt*), kredit yang hampir jatuh tempo (*poor credit*), dan kebutuhan hidup yang tidak terduga (*unexpected financial needs*)

5. Tekanan akan Kebiasaan Buruk (*Vices Pressures*)

Vices Pressures disebabkan oleh dorongan untuk memenuhi kebiasaan yang buruk, misalnya berhubungan dengan: judi, obat-obat terlarang, alkohol, dan barang-barang mahal yang sifatnya negatif. Sebagai contoh, seseorang yang suka berjudi akan terdorong untuk melakukan apapun untuk memperoleh uang sebagai taruhan (*gambling*).

6. Tekanan yang Berhubungan dengan Pekerjaan (*Work-Related Pressures*)

Tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh karyawan, misalnya kurangnya perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan, dan sebagainya, dapat membuat karyawan harus melakukan *Fraud* untuk memperoleh “imbalan” atas kerja kerasnya.

ACFE sebagai lembaga independen yang berfokus pada *fraud* melakukan sebuah *study* terhadap beberapa responden terkait dengan *behavioral red flags*. Perilaku yang menyebabkan terjadinya *red flag* paling banyak terjadi karena kehidupan glamor dan hedon yaitu sebesar 45,8%. Kemudian disusul dengan kesulitan keuangan sebesar 30%, terdapat asosiasi dengan vendor atau dengan pelanggan, dan beberapa alasan lainnya

1.5 *Fraud*

Fraud adalah definisi kecurangan secara literal. Pada saat yang sama, menurut definisi Black's Law Dictionary, *Fraud* mencakup semua jenis hal yang dapat dipikirkan manusia, dan seseorang mencoba memanfaatkan kepentingan orang lain melalui saran yang salah atau fakta yang dipaksakan, dan mencakup semua siasat tak terduga, licik, penyembunyian, dan cara tidak jujur apa pun yang menyebabkan orang lain tertipu.

Kecurangan menurut Statement of Auditing Standards (SAS) No. 99 tentang Pertimbangan Penipuan dalam Audit Laporan Keuangan

merupakan tindak kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. Sedangkan pada Standar the Institute of Internal Auditors (2013) kecurangan adalah segala perbuatan yang dicirikan dengan pengelabuan atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, aset, jasa, atau mencegah pembayaran atau kerugian atau untuk menjamin keuntungan atau manfaat pribadi dan bisnis.

Berdasarkan definisi kecurangan (fraud) yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan tindakan tidak jujur yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu atau membohongi orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut Karyono (2013), fraud adalah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016), fraud adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) membuat kategori kecurangan (fraud) yang dikenal dengan istilah fraud tree. Total kasus kecurangan yang ditemukan sebanyak 154 kasus, kecurangan yang terjadi seperti korupsi sampai penyalahgunaan aset. Kecurangan yang terjadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, pada penelitian ini, peneliti akan mengambil faktor dari teori yang dikembangkan oleh Vousinas (2019) dari National Technical University of Athens, teori ini berasal dari pengembangan teori pentagon. Teori yang dikembangkan oleh Vousinas (2019) ini berasal dari pengembangan teori pentagon (S.C.O.R.E), yang terdiri dari Stimulus, Capability, Opportunity, Rationalization, dan Ego. Kemudian, Vousinas memperbarui dan mengadaptasi teori tersebut dari kasus fraud yang ada dengan menambahkan Collusion. Teori ini berpendapat bahwa kolusi secara tidak sengaja dapat pula menjadi pengembang fraud yang ada di dalam organisasi. Fraudster menggunakan kemampuan mereka untuk

mengambil keuntungan dari posisi orang lain dan memanfaatkan korban (Vousinas,2019). Penelitian ini merupakan pengembangan dari teori-teori fraud sebelumnya, seperti penelitian dari Hartoyo (2016) berjudul “Analisis Pentagon Fraud dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa opportunity berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Sedangkan pressure, ratalizayion, competency dan arrogance tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting.

1.6 Kecurangan Laporan Keuangan

American Institute Certified Public Accountant (2002) laporan keuangan yang mengandung kecurangan adalah tindakan atau kelalaian yang disengaja, yang akan mengakibatkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang menyesatkan.

Tindakan manajemen laba yang dilakukan manajemen akibat dari *agency problem* yang terjadi antara agent dan principal berkaitan erat dengan kecurangan (fraud). Kecurangan (fraud) yang sengaja dilakukan oleh manajemen merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pihak regulator [14]. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan (fraud) merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik terhadap individu, entitas, serta pihak lain.

ACFE menggambarkan fraud dalam bentuk pohon (fraud tree). Fraud tree mempunyai tiga cabang utama, yaitu penyimpangan aset (asset misappropriation), kecurangan laporan keuangan (financial statements fraud), dan korupsi (corruption). Dalam tiga cabang utama tersebut dapat digolongkan beberapa tindakan yang dilakukan yaitu pertama, asset misappropriation berupa kecurangan kas (cash fraud). Kedua, financial statement fraud yang dikategorikan dalam timing difference yaitu mencatat waktu transaksi berbeda atau lebih awal dari waktu transaksi sebenarnya.

Ketiga, corruption, merupakan jenis fraud paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain dalam menikmati keuntungan seperti suap dan korupsi. Korupsi terbagi atas suap (bribery) dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam

membuat keputusan bisnis, pemberian hadiah setelah terjadinya kesepakatan (illegal gratuity), dan pemerasan secara ekonomik (economic extortion).

Menurut ACFE, fraudulent financial reporting adalah kekeliruan yang disengaja dari kondisi keuangan suatu perusahaan yang dilakukan melalui perbuatan salah saji dan kelalaian dari jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Fraudulent financial reporting meliputi manipulasi, pemalsuan, atau alteration catatan akuntansi atau dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun tidak menyajikan kebenaran atau dengan sengaja menghilangkan kejadian, transaksi, dan informasi penting dari laporan keuangan dan dengan sengaja menerapkan prinsip akuntansi yang salah.

1.7 Fraud Triangle Theory

Teori ini dikemukakan oleh Cressey (1998) disebut sebagai segitiga kecurangan atau *fraud Triangle*. *Fraud triangle theory* ini merupakan sebuah ide yang membahas sebab akibat terjadinya kecurangan. *Pressure*, *Opportunity*, dan *Rationalization* adalah tiga faktor yang hadir dalam *fraud* sebagaimana yang dijelaskan dalam *fraud triangle*.

1. *Pressure* merupakan dorongan atau tekanan untuk melakukan *fraud*. Memenuhi gaya hidup, eksistensi, tuntutan ekonomi dan lain-lain, termasuk dalam hal keuangan maupun non keuangan merupakan unsur-unsur dari *pressure*.
2. *Opportunity* merupakan sebuah peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud*, karena mereka para pelaku tindakan kecurangan percaya dan yakin bahwa kegiatan mereka tidak akan diketahui.
3. *Rasionalization* menjadi sebuah elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Dalam *fraud triangle* *rasionalization* merupakan bagian yang paling sulit untuk diukur (Skousen et al., 2009).

Penelitian fraud triangle juga dilakukan dengan cara memproksikannya dalam berbagai kondisi. Lou dan Wang (2009) membuat suatu model melalui pendekatan fraud triangle yang diproksikan ke dalam berbagai kondisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa proksi signifikan dalam mendeteksi kecurangan

laporan keuangan, di mana proksi-proksi tersebut adalah bagian dari tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Skousen et al. (2009) juga membuat model pendeteksian kecurangan laporan keuangan yang berbeda dari penelitian Lou dan Wang (2009). Setelah diuji ternyata hanya proksi dari variabel tekanan dan kesempatan saja yang signifikan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Namun model yang dicetuskan Skousen et al. (2009) memiliki tingkat ketepatan prediksi kecurangan laporan keuangan sebesar 73%. Hasil ini menunjukkan peningkatan yang substansial dibandingkan dengan model prediksi kecurangan lainnya. Penelitian ini akan mengacu pada penelitian Skousen et al. (2009) untuk menguji kembali model pendeteksian kecurangan pada lingkup perusahaan di Indonesia. Sama seperti penelitian yang dilakukan Skousen et al. (2009), data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang melakukan kecurangan serta laporan keuangan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan sebagai pembandingnya. Daftar perusahaan yang melakukan kecurangan didapat dari laporan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Jakarta. Sebagai bentuk pengembangan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menambah proksi dari variabel tekanan yaitu margin laba bersih, tingkat pertumbuhan aset perusahaan yang dibandingkan dengan rata-rata industri, terjadi kerugian pada perusahaan, dan terjadi nilai negatif pada arus kas operasi. Variabel kesempatan juga akan ditambahkan proksi yaitu jumlah pertemuan yang diselenggarakan komite audit selama setahun. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini dilakukan untuk menguji teori fraud triangle yang dikembangkan oleh Cressey (1953) dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan.

1.8 *Fraud Diamond Theory*

Pada tahun 2004 David T. Wolfe and Dana R. Hermanson telah memperkenalkan teori *fraud* dan dikenal dengan *fraud diamond theory*. Teori *fraud diamond* merupakan penyempurnaan teori *fraud triangle*. Selain elemen yang dijelaskan dalam *fraud triangle theory*, *fraud diamond theory* menambahkan elemen kapabilitas/kemampuan (*capability*) sebagai elemen keempat. Menurut Wolfe dan Hermanson (2014), penipuan atau kecurangan tidak mungkin bisa dilakukan dengan

atau tanpa orang yang mempunyai kemampuan yang tepat dalam melakukan penipuan atau kecurangan tersebut. Kemampuan yang dimaksud adalah karakter individu melakukan penipuan, yang dimanfaatkan dalam kesempatan yang ada. Peluang menjadi gerbang masuk untuk terjadinya *fraud*, tekanan dan rasionalisasi bisa menarik seseorang untuk melakukan fraud, tetapi orang tersebut harus mempunyai kemampuan yang baik untuk mengenali peluang tersebut agar bisa melakukan taktik *fraud* dengan tepat dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Fraud diamond merupakan suatu pandangan baru mengenai fenomena fraud yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Wolfe dan Hermanson menyatakan bahwa secara keseluruhan fraud diamond merupakan penyempurnaan dari fraud triangle model yang dikemukakan Cressey. Adapun elemen-elemen dari fraud diamond theory yaitu pressure, opportunity, rationalization dan capability. Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa ada pembaharuan fraud triangle untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mencegah fraud yaitu dengan cara menambahkan elemen keempat yakni capability (kemampuan). Banyak fraud yang umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan capability (kemampuan) khusus yang ada dalam perusahaan. Opportunity membuka peluang atau pintu masuk bagi fraud, pressure dan rationalization yang mendorong seseorang untuk melakukan fraud. Tiga hal yang dapat diamati dalam memprediksi penipuan yaitu: 1). posisi atau fungsi resmi dalam organisasi; 2). kapasitas untuk memahami dan memanfaatkan sistem akuntansi dan kelemahan pengendalian internal; 3). keyakinan bahwa dia tidak akan terdeteksi atau jika tertangkap dia akan keluar dengan mudah; 4) kemampuan untuk mengatasi stres yang timbul pada lingkungan yang baik ketika dia melakukan perbuatan buruk. (Kassem and Higson,2012) Menurut Wolfe dan Hermanson (2004), kecurangan (fraud) tidak mungkin terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan kecurangan tersebut. Kemampuan ini adalah sifat individu untuk melakukan kecurangan, yang mendorong mereka mencari kesempatan dan memanfaatkannya. Orang harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengenali peluang tersebut agar dapat melakukan taktik fraud dengan tepat. Fraud Diamond dalam Financial Statement Fraud BISNIS, Vol. 4, No. 2,

Desember 2016 107 Opportunity Pressure Rationalization Capability Fraud Diamond Gambar. 1 6. Pengukuran Fraud Diamond Teori fraud diamond merupakan teori fraud yang terdiri dari 4 faktor pendorong dalam melakukan tindakan fraud. Keempat faktor tersebut adalah pressure/insentif, peluang, rasionalisasi dan kemampuan (Wolfe dan Hermanson, 2004). Pressure atau insentif merupakan keinginan/atau memiliki kebutuhan untuk, melakukan fraud. Peluang merupakan adanya kelemahan dalam suatu sistem sehingga orang yang tepat sangat memungkinkan untuk mengeksploitasi tindakan fraud. Rasionalisasi merupakan suatu tindakan rasional yang membenarkan bahwa saya telah meyakinkan diri bahwa tindakan fraud ini mempunyai nilai risiko. Kemampuan merupakan faktor keempat dari teori fraud diamond yang menganggap bahwa saya memiliki sifat dan kemampuan yang diperlukan untuk menjadi orang yang tepat untuk melakukan fraud

1.9 Fraud Pentagon Theory

Teori *fraud diamond* yang dikemukakan oleh D.R. Cressey, ternyata terjadi perluasan yang dipicu oleh keadaan dan kondisi saat ini yaitu teori *fraud pentagon* yang dikemukakan oleh Crowe Howarth pada Tahun 2011. Perluasan yang dimaksud oleh teori ini adalah penambahan 2 unsur yaitu *competence* atau kompetensi dan *arrogance* atau arogansi. Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan kecurangan. Dalam hal ini, contohnya tingginya jabatan adalah salah satu kompetensi seseorang untuk dapat melakukan *fraud*. Arogansi merupakan sikap yang memperlihatkan bahwa peraturan dan kebijakan dari perusahaan tidak berlaku bagi dirinya dan merasa dirinya bebas dari kebijakan, regulasi dan kontrol internal perusahaan sehingga pelaku kecurangan merasa tidak bersalah atas kecurangan yang dilakukan.

Fraud yang melibatkan angka milyaran bahkan triliunan tidak akan terjadi tanpa adanya orang yang tepat dengan keahlian yang tepat. Berdasarkan pengalaman Wolfe dan Hermanson (2004) dalam menginvestigasi fraud selama lebih dari 15 tahun, terdapat beberapa kondisi yang mendukung adanya fraud, terutama terkait elemen capability. Pertama, posisi seseorang atau fungsinya dalam organisasi memberikannya kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk berbuat curang yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Kedua, orang yang tepat untuk melakukan fraud adalah memiliki kepintaran yang cukup untuk memahami dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan menggunakan posisi, fungsi, atau fungsi otorisasi untuk menghasilkan keuntungan yang besar.

Hal ini didukung oleh data ACFE (2016) bahwa 51% dari pelaku kecurangan memiliki setidaknya gelar sarjana, 49% dari pelaku berusia 66 lebih dari 40 tahun dan 46% dilakukan oleh manajer atau pimpinan perusahaan. Ketiga, pelaku fraud memiliki ego yang kuat dan keyakinan besar bahwa ia tidak akan terdeteksi, atau orang lain percaya bahwa ia bisa dengan mudah keluar dari kesulitan jika tertangkap. Keempat, penipu sukses bisa memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seseorang dengan kepribadian yang sangat persuasif mungkin dapat meyakinkan orang lain untuk melakukan kecurangan. Kelima, penipu ulung berbohong secara efektif dan konsisten. Dia juga memiliki keterampilan untuk menjaga kebohongan, sehingga cerita kecurangan secara keseluruhan tetap konsisten.

Terakhir, sebuah penipu sukses sangat mampu mengelola stres dengan baik. Melakukan penipuan dan mengelola penipuan selama periode waktu yang panjang bisa mengakibatkan stress berkepanjangan. Capability dalam kerangka Fraud Diamond Theory ini diukur berdasarkan usia, pengalaman, dan tingkat pendidikan CEO mengacu pada capability factor yang disebutkan oleh ACFE (2016) serta pergantian direksi serta pergantian direksi sebagaimana digunakan dalam penelitian (Tessa dan Harto, 2016). Semakin matang usia seorang CEO, semakin baik pengendalian dirinya, sehingga akan lebih tenang dalam merencanakan fraud. Semakin berpengalaman seorang CEO, akan semakin mampu dalam menyusun rencana fraud dengan baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang CEO, akan semakin tinggi pemahaman keilmuannya dan semakin baik dalam mengantisipasi risiko yang ditimbulkan dari tindakan fraud.

1.10 *Fraud Hexagon Theory*

Setelah teori *pentagon* dikemukakan oleh Crowe Howarth pada Tahun 2011, terjadi perluasan kembali yang dipicu oleh keadaan atau kondisi saat ini yaitu teori *fraud hexagon* yang dikenalkan oleh Vousinas pada Tahun 2019.

Fraud hexagon terdiri dari enam komponen yaitu stimulus (tekanan), capability (kemampuan), collusion (kolusi), opportunity (kesempatan), rationalization (rasionalisasi), dan ego. Enam komponen dalam teori fraud hexagon merupakan hasil pengembangan dari teori fraud triangle, fraud diamond, dan fraud pentagon dengan menambahkan komponen collusion (kolusi).

Gambar 1.1 Fraud Hexagon



Terdapat perbedaan pada teori ini yaitu pada nama komponen yang digunakan. Beberapa komponen dengan nama yang berbeda pada teori ini memiliki arti yang sama dengan teori-teori sebelumnya. Komponen tekanan pada teori ini disebut dengan stimulus, dimana memiliki arti yang sama dengan pressure (tekanan) yang telah dijelaskan pada teori sebelumnya oleh Cressey Donald (1953), D. T. Wolfe & Hermanson (2004), dan Marks (2011). Selanjutnya adalah komponen ego yang memiliki arti yang sama dengan arrogance (arogansi) telah dijelaskan sebelumnya oleh Marks (2011) pada teori fraud pentagon.

Komponen yang ditambahkan pada teori fraud hexagon adalah komponen kolusi (collusion). Menurut Vousinas, kolusi merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak baik oleh kelompok individu dengan pihak di luar organisasi, maupun antarkaryawan di dalam organisasi. Pada saat kecurangan kolusi terjadi, karyawan yang jujur akan ikut serta melakukan kecurangan dikarenakan lingkungan organisasi yang tidak jujur. Akibatnya, lingkungan yang tidak jujur ini akan semakin berkembang dan menjadi budaya organisasi yang sulit

untuk dihilangkan. Vousinas juga menjelaskan bahwa seseorang dengan kepribadian yang persuasif akan lebih mudah untuk mengajak lingkungannya untuk melakukan kecurangan. Kolusi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk mengambil posisi orang lain. Elemen kolusi ini melengkapi elemen – elemen fraud yang sudah ada dan terdapat elemen tambahan yaitu Gender, yang akan kita teliti lebih lanjut.

Saat suatu skandal terjadi pada suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah harus terlebih dahulu memberikan izin bagi BUMN tersebut untuk dapat melakukan kegiatan di pasar. Pemerintah memiliki kepentingan sebagai pelaksana yaitu meningkatkan pendapatan Negara dan berperan sebagai pemilik perusahaan yang membuat BUMN terhindar dari skandal. Pada satu sisi pemerintah berkepentingan sebagai pelaksana, namun di sisi lain pemerintah juga berkepentingan sebagai pemilik perusahaan yang menginginkan peningkatan kualitas manajemen untuk pengembalian investasi yang optimal. Hal ini mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara banyaknya sumber daya yang dibutuhkan serta tidak kompetennya sumber daya yang dimiliki.

Fenomena ini dapat dilihat dengan banyaknya pimpinan BUMN yang ditunjuk berdasarkan kedekatan politik. Kedekatan ini juga dapat menyebabkan pimpinan BUMN tidak dapat tampil mandiri mengelola perusahaan karena adanya celah yang terdapat dalam hubungan tersebut. Berbeda dengan BUMN, perusahaan swasta cenderung memiliki mekanisme yang lebih selektif dalam pemilihan sumber daya melalui tidak adanya kelompok koalisi politik. Hal ini merupakan bentuk pencegahan skandal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Skandal pada perusahaan milik Negara (BUMN) disebabkan oleh intervensi dari pihak luar perusahaan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ataupun dari birokrasi sendiri. Contoh skandal kecurangan tersebut dapat dilihat pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada Januari 2020 yang dinyatakan melakukan rekayasa akuntansi (window dressing) dengan laba semu. Kasus lain adalah pada PT Garuda Indonesia yang menyajikan laporan keuangan 2018 tidak selaras dengan Standar peraturan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun PSAK. Skandal skandal ini muncul karena adanya sifat oportunistik dari masyarakat/pelaku usaha Indonesia dalam bentuk

manajemen laba dengan memanfaatkan keadaan Negara dengan agency cost yang rendah dan memanfaatkan masa transisi penggunaan IFRS (Internasional Financial Reporting Standards) untuk melakukan manajemen laba. Hal lain yaitu berupa kepemilikan hubungan secara politik untuk melakukan hal-hal yang memungkinkan terjadinya skandal.

BAB II

FINANCIAL TARGET

2.1 Financial Targets

Dalam menjalankan kinerjanya, manajer perusahaan dituntut untuk melakukan performa terbaik sehingga dapat mencapai target keuangan yang telah direncanakan.

Menurut SAS No. 99 tentang Pertimbangan Penipuan dalam Audit Laporan Keuangan (AICPA, 2002), target keuangan adalah risiko adanya tekanan berlebihan pada manajemen untuk mencapai target keuangan yang dipatok oleh direksi atau manajemen, termasuk tujuan-tujuan penerimaan insentif dari penjualan maupun keuntungan.

Menurut Tessa & Harto (2016), target keuangan yaitu keinginan manajemen untuk mendapatkan bonus atas hasil kinerja mereka terhadap pemenuhan keinginan prinsipal yaitu pemenuhan target keuangan berupa laba. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa target keuangan adalah target berupa laba atas usaha yang harus dicapai oleh manajemen sebagai ukuran kinerja perusahaan yang baik. Perolehan laba perusahaan yang sesuai dengan target, memicu perhatian para investor terhadap perusahaan. Untuk mencapai target laba yang telah ditentukan tersebut, manajemen akan melakukan segala cara. Sehingga, terdapat tekanan yang didapatkan oleh manajemen yang mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba sehingga laporan keuangan perusahaan akan disajikan secara tidak wajar dan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Menurut SAS No.99 (AICPA, 2002), *financial target* adalah risiko yang dihadapi manajemen untuk mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan oleh dewan direksi, termasuk tujuan memperoleh insentif dari penjualan atau keuntungan.

Salah satu pengukuran untuk menilai tingkat laba yang diperoleh perusahaan atas usaha yang dikeluarkan adalah Return on Total Assets (ROA). Skousen, C. J. & Wright (2009) mengatakan bahwa Return on Total Assets (ROA) 53 sering digunakan dalam menilai kinerja manajer dan dalam menentukan bonus, kenaikan upah, dan lain-lain. Perbandingan laba terhadap jumlah aset (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan

yang didapat berdasarkan dari total aset yang dimiliki perusahaan. Adapun perhitungan Return on Total Assets (ROA) yaitu sebagai berikut:

$$\boxed{\text{ROA}} = \frac{\text{LabaSetelahPajak}_{t-1}}{\text{TotalAset}_{t-1}}$$

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan tersebut, maka pengukuran target keuangan dalam penelitian ini diproksikan dengan Return on Total Assets (ROA). Return on Total Assets (ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam analisis laporan keuangan atau pengukuran kinerja perusahaan. Pengukuran ini dipilih karena perbandingan laba terhadap jumlah aset (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang didapat berdasarkan dari total aset yang dimiliki perusahaan (Skousen, C. J. & Wright, 2009). Perusahaan juga banyak menggunakan tolok ukur ini dalam pencapaian target keuangan berupa laba. Selain itu, ROA sering digunakan oleh pihak investor untuk menilai return yang akan diperoleh atas investasinya pada perusahaan tersebut.

Financial target juga dapat didefinisikan sebagai tekanan berlebihan pada manajemen untuk mencapai target keuangan yang dipatok oleh direksi atau manajemen. Dalam menjalankan kinerjanya, manajer perusahaan dituntut melakukan pengelolaan terbaik dalam pencapaian target yang telah direncanakan. Selain itu, perusahaan yang memiliki laba yang besar, yang diukur dengan profitabilitas atau ROA, lebih memungkinkan untuk dilakukan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki laba yang kecil. Semakin tinggi ROA yang ditetapkan oleh perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajemen untuk memanipulasi pendapatan (yang merupakan salah satu bentuk penipuan) sehingga memiliki hubungan positif dengan laporan keuangan yang mengandung kecurangan.

2.2 *Ineffective Monitoring*

Salah satu cara untuk meminimalisir *fraud* adalah dengan memiliki rangkaian pengawasan yang baik. Komite audit dipercaya dapat meningkatkan efektivitas pengawasan perusahaan. Beasley, Dana dan Terry (2010) mengemukakan bahwa peningkatan jumlah kursi pada komite audit dapat mengurangi terjadinya kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Skousen et al. (2009) menunjukkan bahwa proporsi

anggota komite audit independen (IND) berdampak pada kecurangan laporan keuangan.

Ineffective monitoring adalah suatu keadaan perusahaan dimana tidak terdapat internal kontrol yang baik. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya dominasi manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil, tanpa kontrol kompensasi, tidak efektifnya pengawasan dewan direksi dan komite audit atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dan sejenisnya.

Adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan kinerja perusahaan sehingga mengurangi tindakan fraud. Beasley et al. (2000), Beasley (1996), Dechow et al. (1996) dan Dunn (2004) dalam Skousen, hal 10 , mengamati bahwa perusahaan yang melakukan fraud memiliki anggota yang lebih sedikit pada direksi bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan fraud.

Oleh karena itu, BDOUT disertakan dalam proksi yang berkaitan dengan komposisi dewan komisaris, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BDOUT} = \text{Persentase dari anggota dewan yang tergabung dalam anggota luar}$$

Dalam keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, pengertian komite audit adalah suatu badan yang berada dibawah Komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota komisaris dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada Komisaris atau Dewan Pengawas.

$$\text{AUDSIZE} = \text{Jumlah dari anggota dewan yang berada didalam komite audit}$$

2.3 *Change in Auditor*

Change in auditor menggambarkan adanya perubahan direksi dalam suatu perusahaan. Pergantian ini dapat dikarenakan keinginan pihak manajemen agar dapat menghasilkan opini yang sesuai dengan yang diinginkan atau karena peraturan (Aprilia, 2017). Setiawati dan

Ratih (2018) menyatakan bahwa pengaruh adanya pergantian auditor dalam perusahaan dapat menjadi indikasi terjadinya kecurangan.

Change in auditor atau pergantian auditor yang digunakan oleh perusahaan dapat dilihat sebagai bentuk perilaku yang menghilangkan pelacakan kecurangan oleh auditor sebelumnya. Tren ini mendorong perusahaan untuk mengganti auditor independennya untuk menutupi kecurangan di perusahaan.

Change in auditor atau pergantian auditor pada perusahaan dapat dianggap sebagai suatu bentuk yang dapat dilakukan untuk menghilangkan jejak fraud (fraud trail) yang ditemukan oleh auditor sebelumnya. Hal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk mengganti auditor independennya guna menutupi kecurangan yang terdapat dalam perusahaan. Perusahaan yang melakukan fraud lebih sering melakukan pergantian auditor, dikarenakan auditor yang lama memiliki lebih dapat mendeteksi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen (Tiffani dan Marfuah, 2015). Oleh sebab itu, perusahaan berusaha mengurangi kemungkinan pendeteksian oleh auditor yang lama terkait kecurangan dalam pelaporan keuangan dengan cara melakukan pergantian auditor yang bermaksud untuk menghilangkan jejak (fraud trail) yang telah didapat oleh auditor lama.

Penelitian ini memproksikan rationalization dengan pergantian kantor akuntan publik (Δ CPA) yang diukur dengan variabel dummy dimana jika terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik selama periode 2016- 2020 akan diberi kode 1, sebaliknya jika pada tahun 2016-2020 tidak terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik selama periode tersebut, maka diberi kode 0.

2.4 Pergantian Direksi Perusahaan terhadap *Financial Statement Fraud*

Pergantian direksi dipilih sebagai variabel dari salah satu elemen *fraud pentagon theory* yaitu *capability*. *Capability* memiliki enam komponen, antara lain: posisi (*positioning*), kecerdasan, kepercayaan diri (diri), keterampilan koersi, penipuan (kebohongan / penipuan efektif) dan manajemen stres (manajemen stres). Instruksi untuk mengganti direktur dapat menggambarkan kemampuan untuk melakukan manajemen stres.

Pergantian direksi tidak selamanya berdampak baik bagi perusahaan. Pergantian direksi bisa menjadi upaya untuk menyingkirkan direksi yang dianggap mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaan (Devy et al., 2017). Selain itu, direksi yang lebih berkompeten dapat membuat kecurangan semakin mungkin terjadi. Wolfe & Hermanson (2004) menjelaskan bahwa kecurangan dapat terjadi jika dilakukan oleh seseorang dengan kemampuan yang tepat untuk melaksanakan kecurangan tersebut. Karyawan yang memiliki intelektualitas atau kemampuan tertentu dianggap mampu mengidentifikasi peluang dan melakukan tindak kecurangan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu, pergantian direksi baru yang lebih berkompeten dianggap mampu melakukan tindakan kecurangan.

Guna mengetahui adanya kemampuan individu ketika menghadapi kesempatan untuk melakukan fraud maka variabel perubahan direksi (DCHANGE) diukur dengan menggunakan variabel dummy yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori, kategori pertama jika terdapat pergantian direksi perusahaan maka akan di beri kode 1 (satu) dan kategori kedua apabila tidak terjadi pergantian direksi perusahaan maka diberi kode 0 (nol).

2.5 Financial Statement Fraud

Taylor dan Glesen (1996) dalam Skosen *et al.* (2009) *Financial statement fraud* merupakan kesengajaan atau kecerobohan baik berupa tindakan yang disengaja ataupun kelalaian yang mengakibatkan kekeliruan bersifat material pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan mengandung informasi yang tidak sebenarnya. Wells (2011) dalam Manurung dan Hardika (2015) menjelaskan bahwa kecurangan laporan keuangan mencakup beberapa modus, antara lain:

1. Pemalsuan, perubahan, atau manipulasi catatan keuangan (*financial record*), dokumen pendukung atau transaksi bisnis.
2. Penghilangan yang disengaja atas peristiwa, transaksi, akun, atau informasi signifikan lainnya sebagai sumber dari penyajian laporan keuangan.
3. Penerapan yang salah dan disengaja terhadap prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, mengakui,

melaporkan dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis.

4. Penghilangan yang disengaja terhadap informasi yang seharusnya disajikan dan diungkapkan menyangkut prinsip dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan

Auditing Standard Board (ASB) dibawah naungan *American Institute of Public Accountant (AICPA)* pada November 2002, menerbitkan *Statement on Auditing Standards (SAS) No.99* yang berjudul *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*. Dalam SAS tersebut, disebutkan terdapat dua jenis salah saji yang relevan dengan audit laporan keuangan dan pertimbangan auditor terhadap *fraud*. Pertama, salah saji yang berasal dari pelaporan keuangan yang salah yang disebut dengan salah saji yang disengaja atau penghapusan terhadap nilai material atau pengungkapan yang didesain untuk mengecoh pengguna laporan keuangan. Kedua, salah saji yang berasal dari penyalahgunaan aset yang disebut juga pencurian atau penggelapan.

Committee of Sponsoring Organization (COSO) of the Treadway Commissions dalam Tuanakotta (2010) melakukan kajian terhadap *financial statement fraud* dan mengembangkan suatu taksonomi yang mungkin dapat terjadi pada semua bisnis. Dijelaskan oleh Tuanakotta (2010) juga bahwa COSO mengidentifikasi enam modus *fraud* pada beberapa area, antara lain :

- a. Mengakui pendapatan yang tidak semestinya.
- b. Melebihsajikan aset (selain piutang usaha yang berhubungan dengan kecurangan terhadap pengakuan pendapatan).
- c. Beban/liabilitas yang kurang saji.
- d. Penyalahgunaan aset.
- e. Pengungkapan yang tidak semestinya.
- f. Teknik lain yang mungkin dilakukan.

2.6 Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan

Auditor harus menyadari dengan cepat kemungkinan terjadinya kecurangan dengan mengandalkan pada sinyal kecurangan (Suprajadi ,2009). Karena, kecurangan yang tidak terdeteksi akan berubah menjadi skandal keuangan yang besar dan merugikan banyak pihak baik investor, kreditor maupun auditor. Akuntan publik mendapat kritikan

secara luas sepanjang dekade terakhir ini, karena gagal melindungi kepentingan investor, khususnya sejak skandal korporasi Enron (Herusetya, 2012). Hal ini, diperparah dengan adanya kesenjangan harapan (*expectation gap*) antara pengguna jasa audit dengan pihak auditor eksternal.

Salah satu cara untuk mengatasi adanya kesenjangan harapan (*expectation gap*) tentang tanggung jawab auditor adalah melalui Standar Audit Seksi 110. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 110 tentang tanggung jawab dan fungsi auditor independen, “auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji material terdeteksi, yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan” (IAI, 2001).

Konsep keyakinan memadai menunjukkan bahwa auditor bukan seorang penjamin kebenaran laporan keuangan. Jika auditor bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua asersi di dalam laporan keuangan adalah benar, persyaratan untuk mendapatkan bahan bukti dan biaya pelaksanaan audit akan naik sampai tingkat dimana audit tersebut secara ekonomis tidak layak. Pembelaan terbaik bagi auditor jika salah saji material tidak terungkap di dalam audit bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum (Koroy, 2008).

Audit tidak dapat diharapkan untuk memberikan tingkat keyakinan yang sama dalam pendeteksian kecurangan manajemen yang material seperti dalam pendeteksian kekeliruan yang material. Upaya penyembunyian dilakukan oleh manajemen, membuat kecurangan lebih sulit ditemukan auditor. Biaya untuk memberikan keyakinan yang sama tingginya antara kecurangan manajemen dan kekeliruan mungkin sekali tidak dapat diterima baik auditor maupun masyarakat. Untuk dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan dapat digunakan teknik audit investigatif yaitu proses audit yang dimaksudkan untuk mengumpulkan,

menganalisis dan membuat ikhtisar bukti-bukti sebagai kelengkapan pembuktian di pengadilan. Teknik audit investigatif untuk mendeteksi kecurangan (*fraud*) (Tuanakotta, 2012) yaitu:

a. Penggunaan teknik-teknik audit yang dilakukan oleh internal maupun eksternal auditor dalam mengaudit laporan keuangan, namun secara lebih mendalam dan luas. Teknik-teknik audit laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan analisis yang lebih mendalam dan luas diantaranya:

- 1) Pemeriksaan fisik (*physical examination*) adalah teknik perhitungan fisik sumberdaya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan. Teknik ini menyediakan cara evaluasi atas bukti fisik tentang jumlah yang ada.
- 2) Konfirmasi (*confirming*) adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien.
- 3) Pemeriksaan bukti pendukung (*vouching*) adalah teknik untuk mendapatkan serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar pencatatan ayat jurnal untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi.
- 4) Prosedur analitis (*analytical procedures*) adalah evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dengan data keuangan atau antara data keuangan dengan data nonkeuangan.
- 5) Permintaan keterangan (*inquiring*) adalah permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor kepada manajemen atau karyawan.
- 6) Pengamatan (*observing*) adalah teknik yang berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatan dapat berupa pemrosesan rutin jenis transaksi tertentu seperti penerimaan kas untuk melihat apakah para pekerja melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Teknik ini penting untuk mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal klien.
- 7) Pelaksanaan ulang (*reperforming*) adalah pelaksanaan ulang perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien.

- b. Pemanfaatan teknik audit investigatif dalam kejahatan terorganisir dan penyelundupan pajak penghasilan, yang dapat diterapkan terhadap data kekayaan pejabat negara.
- c. Penelusuran jejak-jejak arus uang.
- d. Penerapan teknik analisis dalam bidang hukum.
- e. Penggunaan teknik audit investigatif untuk mengungkapkan *fraud* pengadaan barang.
- f. Penggunaan komputer forensik.
- g. Penggunaan teknik interogasi.
- h. Penggunaan operasi penyamaran.
- i. Pemanfaatan *whistleblower*.

BAB III

PERAN CEO DALAM LAPORAN KEUANGAN

3.1 *Frequent Number of CEO's Picture*

Gambar CEO yang muncul seringkali mengacu pada banyaknya gambar CEO yang ditampilkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Frequent number of CEO's picture merupakan jumlah foto seorang CEO yang terpampang dalam suatu perusahaan dengan menampilkan display picture ataupun profil, prestasi, foto, ataupun informasi lainnya mengenai track of record CEO yang dipaparkan secara berulang-ulang didalam laporan keuangan tahunan perusahaan (Crowe, 2011 dalam Yusuf, Khair,& Simon,2015). Banyaknya foto CEO yang terpampang dalam sebuah laporan tahunan pada perusahaan dapat merepresentasikan tingkat arogansi atau superioritas yang dimiliki CEO tersebut.

Seorang CEO cenderung ingin lebih menunjukkan kepada semua orang mengenai status dan posisi yang dimilikinya didalam sebuah perusahaan karena mereka merasa tidak ingin kehilangan status atau posisi tersebut seperti halnya tidak dianggap. Hal ini sesuai dengan salah satu elemen yang dikemukakan oleh Crowe (2011). Tingkat arogansi yang tinggi dapat menimbulkan terjadinya fraud dikarenakan adanya rasa arogansi dan superioritas yang dimiliki seorang CEO dapat membuat CEO merasa bahwa kontrol internal apapun tidak akan berlaku bagi dirinya karena status dan posisinya.

3.2 *Ikatan Politik dengan Politisi atau Pemerintah*

Perusahaan yang berkoneksi politik merupakan perusahaan yang dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Aristoteles mendefinisikan politik sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Jadi, dapat disimpulkan bahwa koneksi politik dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang dimiliki perusahaan dan dapat membantu untuk memperoleh apa yang dikehendakinya

Kolusi merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk tujuan kurang baik, seperti menipu pihak ketiga atas haknya (Vousinas, 2019). Pihak yang mungkin terlibat kolusi adalah karyawan

dalam suatu perusahaan, baik dilakukan antarkaryawan maupun karyawan dengan pihak eksternal seperti politisi atau pemerintah. Kerjasama yang dilakukan perusahaan dengan pemerintah akan memberikan keuntungan kepada perusahaan seperti lebih mudah di bail out pemerintah ketika mengalami kesulitan keuangan. Kerjasama ini juga mempermudah perusahaan untuk memperoleh bantuan yang dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

Koneksi politik yang dijalin oleh perusahaan akan membuat perusahaan memperoleh berbagai keuntungan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah mendapatkan pinjaman bank, perpajakan, dan mendapatkan kontrak dari pemerintah dapat diperoleh dengan lebih mudah. Manfaat lain yang dapat diperoleh adalah adanya hak-hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan seperti jika terjadi krisis ekonomi maka pemerintah akan memberikan dana talangan (Butje & Tjondro, 2014). Menurut Ngan (2013) koneksi politik yang dimiliki oleh suatu perusahaan dianggap dapat membantu kinerja perusahaan dan juga meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Chaney et al. (2011) perusahaan dengan koneksi politik akan tidak terlalu memperdulikan kualitas informasi di dalam laporan keuangan yang disajikan perusahaan dan akan sedikit menggunakan waktu mereka untuk menyampaikan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Adanya koneksi politik membuat perusahaan cenderung berpotensi untuk menurunkan kualitas laporan keuangan karena memanfaatkan koneksi politik tersebut. Kualitas laporan keuangan sangat menjadi perhatian, karena merupakan cerminan dari kinerja perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut maupun masyarakat.

Konsep gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin (sex) bermakna perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan secara kodrati sebagai pemberian Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender merupakan perbedaan yang dibentuk secara sosial. Konsep gender adalah pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Gender sendiri merupakan sebuah konsep analisis untuk mengidentifikasi perbedaan antara pria dan wanita yang dilihat dari sudut pandang nonbiologis, seperti sosial, budaya, dan juga psikologi (Pektra dan Kurnia, 2015). Kecurangan laporan keuangan dapat terjadi

disebabkan oleh berbagai alasan seperti yang telah dijelaskan dalam teori fraud pentagon, yaitu tekanan (pressure), peluang (opportunity), rasionalisasi (rationalization), kompetensi (competence), dan arogansi (arrogance). Teori atribusi menjelaskan bahwa terdapat faktor internal yang berasal dalam diri individu, dalam hal ini ialah gender dan juga kualitas audit. Kedua variabel ini diharapkan mampu memberikan pengaruh pada proses deteksi dini kecurangan laporan keuangan

Gender merupakan karakteristik individu yang berasal dari dalam diri seseorang yang membawa serta persepsi diri. Persepsi diri yang dimiliki berdasarkan gender kemudian berpengaruh dalam pembentukan judgment. Auditor dengan gender androgini lebih fleksibel dalam menempatkan diri. Individu androgini terbebas dari pembatasan gender dan lebih leluasa memadukan perilaku maskulin dan feminin dalam situasi sosial yang berbeda-beda (Richmond dan Abbot dalam Setyaningsih, 2009). Peran gender yang seimbang membawa persepsi diri yang lebih baik, sehingga lebih tepat dalam membuat kesimpulan terhadap kejadian disekitarnya.

Menurut (Ghozic, 2014) perencanaan keuangan didefinisikan sebagai proses bagi seorang individu untuk dapat mencapai tujuan finansial dengan cara implementasi dan pengembangan rencana keuangan yang komprehensif. Perencanaan keuangan yang jelas dan dapat membantu dalam mencapai tujuan adalah perencanaan keuangan yang baik, rencana keuangan dianalogikan seperti sebuah cetak biru yang dapat memberikan gambaran arah kondisi keuangan seorang individu akan berjalan, sehingga perencanaan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan. Menurut (Billingsley, Gitman, & Joehnk, 2016) perencanaan keuangan adalah proses sistematis dalam mempertimbangkan beberapa unsur penting perihal keuangan seorang individu untuk memenuhi tujuan keuangannya

BAB IV

KEPATUHAN AUDITOR

BERDASARKAN *INTERNATIONAL STANDARD AUDITING*

4.1 Kepatuhan Auditor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti taat pada perintah atau aturan, berdisiplin (diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, pada tanggal 3 Januari 2019, pukul 23.33 WIB). Dalam konteks tata kelola perusahaan, kepatuhan berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu (Hidayati dan Abdullah, 2016).

Sebuah standar dibuat untuk dipatuhi dan diberlakukan sebagai sebuah pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Demikian halnya dengan standar audit yang dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan audit dapat berjalan dengan baik oleh auditor maupun akuntan publik yang melaksanakan pekerjaan auditor. Dalam penugasan audit, auditor independen bertanggung jawab untuk memenuhi standar audit yang telah dibuat oleh badan pembuat standar. Seperti Standar Profesi Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) di Indonesia dan standar internasional yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) yaitu *International Standards on Auditing (ISA)*. Kepatuhan auditor diukur dari seberapa besar mereka dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Hidayati dan Abdullah, 2016).

Indonesia mengadopsi *International Standards on Auditing ISA* dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Hal ini ditindak lanjuti dengan diberlakukannya standar terkait untuk audit atas laporan keuangan emiten yang dimulai pada atau sesudah tanggal 1 Januari 2013, dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Tanpa komitmen dalam mematuhi standar, maka setiap individu dalam satu Kantor Akuntan Publik akan memiliki tingkah laku dan perlakuan terhadap penugasan yang berbeda-beda yang dinilai baik menurut anggapannya dalam berinteraksi (Hidayati dan Abdullah, 2016). Penerapan standar ini memang tidak serta merta dapat dilaksanakan oleh KAP untuk auditor-auditornya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian oleh Sari

dan Rustiana (2016), pada tahun 2016 hanya 17%

KAP yang benar-benar menerapkan ISA dalam pelaksanaan standar auditnya. Hal tersebut terjadi, karena masih adanya proses untuk memahami poin-poin dari standar ISA serta pelatihan-pelatihan untuk auditor- auditornya.

Bank Dunia dalam laporannya “*Report on the Observance of Standards and Codes/ ROSC Indonesia*” (2011), mengungkapkan beberapa kesenjangan kepatuhan yang penting dalam praktik audit. Beberapa celah kepatuhan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Perencanaan Audit (*audit planning*). Bank Dunia menyebutkan bahwa banyak auditor di Indonesia tampaknya tidak menghargai pentingnya perencanaan audit yang tepat dan sering melakukan audit tanpa mengembangkan rencana audit yang tepat.
- 2 Dokumentasi (*documentation*). Bank Dunia menilai bahwa di antara sebagai auditor yang berpraktik, kurangnya pemahaman mengenai apa yang didokumentasikan dan cara mendokumentasikannya. Sebagian besar dalam audit perusahaan kecil dan menengah, praktik dokumentasi gagal memberikan bukti audit untuk mendukung opini audit.
- 3 Kecurangan (*fraud*). Bank Dunia menilai bahwa auditor di Indonesia yang berpraktik tampaknya tidak melakukan upaya terbaik dalam menerapkan prosedur untuk mendeteksi kecurangan dengan baik saat melakukan kegiatan audit.
- 4 Kelangsungan Usaha (*going concern*). Dalam beberapa perikatan/ penugasan audit, Bank Dunia menilai bahwa di Indonesia, kurangnya prosedur untuk mendapatkan audit yang memadai tentang kelayakan penggunaan manajemen atas asumsi kelangsungan usaha dalam persiapan dan penyajian laporan keuangan.
- 5 Pihak Berelasi (*Related Parties*). Dalam beberapa audit, Bank Dunia menilai bahwa auditor di Indonesia tampaknya tidak serius menerapkan prosedur yang ketat untuk mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko salah saji material yang timbul dari kegagalan entitas yang diaudit untuk secara tepat menjelaskan atau mengungkapkan hubungan, transaksi, atau saldo pihak terkait.
- 6 Masalah lain (*Other Issues*). Bank Dunia menyebutkan dalam laporannya bahwa auditor di Indonesia kadang-kadang tidak menerapkan prosedur yang diperlukan dan sepenuhnya bergantung

pada penilaian manajemen. Auditor juga pada umumnya ditemukan menerima laporan penilaian, laporan aktuarial, dan pendapat/ laporan ahli lainnya tanpa mengevaluasi apakah ahli memiliki kompetensi, kemampuan dan obyektivitas yang diperlukan untuk tujuan auditor.

Kepatuhan auditor terhadap ketentuan pedoman atau standar audit menjadi penting, karena apabila diterapkan dalam penugasannya, sikap kepatuhan tersebut akan meningkatkan kualitas audit (Harahap, dkk., 2017). Kualitas audit yang tinggi inilah yang akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor juga karena sifat profesionalnya yang ditunjukkan dengan kepatuhannya terhadap standar audit yang berlaku. (Hidayati dan Abdullah, 2016).

4.2 *International Standards on Auditing (ISA)*

International Standards on Auditing (ISA) merupakan standar audit terbaru yang diadopsi oleh di Indonesia yang diwujudkan melalui revisi terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan mengutip dari laman www.feb.ugm.ac.id (yang diakses pada tanggal 04 September 2018, pukul 14.06 WIB), akuntan publik wajib melakukan audit atas laporan keuangan emiten berdasarkan standar yang baru ini per 1 Januari 2013.

International Standards on Auditing (ISA) diterbitkan oleh IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) yang merupakan lembaga independen yang menetapkan standar (*independent standard-setting body*) untuk kepentingan umum dengan menetapkan standar internasional bermutu tinggi, dalam bidang audit, *assurance* serta standar lain yang terkait. IAASB juga memfasilitasi konvergensi standar internasional dan standar nasional di bidang audit dan *assurance* secara global (Tuanakotta, 2015:39). IAASB berada di bawah naungan IFAC (International Federation of Accountants) sebagai komite tetap yang meningkatkan mutu dan konsistensi praktik audit di seluruh dunia serta memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi audit dan *assurance* secara global.

ISA diterbitkan dalam konteks audit atas laporan keuangan oleh auditor independen. ISA perlu diadaptasi atau diadopsi sesuai dengan kebutuhan untuk diterapkan pada audit atas laporan keuangan historis. ISA berisi standar-standar yang diperlukan dalam pekerjaan auditor yang tidak lain untuk memenuhi tujuan dari audit laporan keuangan.

Adapun tujuan

yang dimaksud yaitu perumusan opini atau pendapat auditor mengenai laporan keuangan yang disusun, dalam semua hal yang material, telah sesuai (tidak sesuai) dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (IAASB preface, 2015:3).

Adapun dalam melaksanakan audit, tujuan keseluruhan auditor adalah untuk mendapatkan jaminan yang dapat diterima (*reasonable assurance*) mengenai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik karena penipuan atau kesalahan, dan untuk melaporkan laporan keuangan sesuai dengan temuan auditor. ISA mensyaratkan bahwa auditor memodifikasi pendapatnya yang sesuai atau menarik diri dari perikatan, jika tujuan keseluruhan ini belum atau tidak dapat dicapai.

Terdapat perbedaan antara ISA dan standar audit sebelumnya, yang merupakan perubahan yang substantif dan mendasar yang dapat mencerminkan cara berpikir yang berbeda yang melandasi teknik audit tertentu. Perubahan dan substantif yang dimaksud, menurut Tuanakotta (2015:56), yaitu:

1. Penekanan pada Audit Berbasis Risiko

Terdapat penekanan yang besar pada aspek risiko dalam setiap tahap auditnya. SPAP yang sebelumnya tidak mengabaikan aspek risiko ini, namun setelah audit berbasis ISA yang merupakan sinonim dari audit berbasis risiko, lebih menekankan dan memperhatikan setiap risiko yang bisa timbul dari proses audit yang dilakukan. Tuanakotta

(2015: 237) melihat audit berbasis risiko dari dua sisi yaitu entitas dan auditor.

Sisi yang pertama, menggambarkan perspektif dan tujuan entitas. Sisi ini memperlihatkan risiko bawaan (*inherent risk*) yang tanpa mempertimbangkan mitigasi oleh pengendalian internal, berisi semua faktor risiko bisnis serta kecurangan yang bisa menyebabkan laporan keuangan disalahsajikan secara material. Sisi ini juga mencerminkan prosedur pengendalian yang pervasif dan spesifik yang dibuat oleh manajemen, tidak lain untuk memitigasi risiko laporan keuangan yang disalahsajikan. Sisi ini menunjukkan risiko pengendalian (*control risk*). Adapula *management's residual risk* yang merupakan risiko yang tersisa setelah manajemen

mengupayakan segala pengendalian.

Sisi yang kedua, menunjukkan perspektif auditor. Auditor berupaya melaksanakan penilaian risiko, hal ini untuk menentukan apakah laporan keuangan entitas bebas dari salah saji yang material.

2. Perubahan dari standar berbasis aturan ke standar berbasis prinsip Standar berbasis aturan (*rules-based standards*), menetapkan langkah demi langkah dengan banyak petunjuk teknis yang diharapkan dapat membantu auditor mencapai tujuan. Standar berbasis aturan ini dinilai sangat rumit dan mengekang kearifan professional.

Atas dasar tersebut, terjadi perubahan dari standar berbasis aturan ke standar berbasis prinsip. Perubahan ini, diharapkan dapat membuat auditor bisa mengembangkan kearifan profesionalnya tanpa harus terikat dengan aturan-aturan yang berlaku.

Tuanakotta (2015:57) menyatakan perubahan ini sangat signifikan dan dasar dalam standar berbasis prinsip itu, ialah:

- a. Mengetahui tujuan (audit) yang ingin dicapai;
 - b. Mengenai lapangan dengan baik (klien, industri klien dan lingkungan klien);
 - c. Mengetahui apa yang wajib dilakukan, agar audit sesuai standar dan auditnya bermutu,
 - d. Senantiasa waspada, menggunakan kearifan professional (*professional judgement*), untuk mencapai tujuan.
3. Berpaling dari Model Matematis

ISA tidak mengabaikan model matematis. Namun, jika model matematis menimbulkan keraguan yang besar, ISA memberikan keleluasaan menerapkan kearifan professional. Pendekatan matematis dinilai menjadikan auditor sebagai robot dan hal ini ditakutkan akan membuat auditor berhenti berpikir. Sehingga, penggunaan model matematis tidak lagi menjadi sebanyak sebelum ISA diadopsi. Hal ini memberikan ruang pada penerapan *professional judgement* yang lebih luas.

4. Menggunakan Kearifan Profesional

Penekanan pada penerapan *professional judgement* (kearifan profesional), merupakan contoh mendasar yang ditekankan pada ISA (Tuanakotta, 2015:58). Menurut ISA, jika keputusan audit yang penting dibuat oleh asisten/ auditor yang belum berpengalaman,

maka auditnya tidak sesuai dengan standar. ISA melihat bahwa diharuskan adanya keterlibatan auditor yang berpengalaman dan mumpuni. Auditor tersebut sudah harus memiliki jam terbang dan pakar dalam audit bidang tertentu, telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang tepat dengan penugasannya serta memiliki ciri-ciri kepribadian tertentu, seperti kewaspadaan profesional.

5. Penerapan Kewaspadaan Profesional (*Professional Skepticism*)

Kewaspadaan profesional (*Professional Skepticism*) adalah tanggapan wajar dari auditor yang berhadapan dengan risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang tidak disengaja (*error*) maupun yang berniat jahat (*fraud*) (Tuanakotta, 2015:59). ISA menekankan penerapan kewaspadaan profesional auditor, sejak sebelum dimulainya penerimaan penugasan audit. Auditor wajib untuk menerapkan kewaspadaan profesionalnya setiap saat ketika melaksanakan auditnya.

6. Penilaian dan pengendalian internal

Pengendalian internal merupakan perubahan mendasar dalam standar audit dan bagian yang tidak terpisahkan dari audit berbasis risiko (Tuanakotta, 2015:59). ISA mewajibkan sistem pengendalian internal suatu kewajiban yang harus dipenuhi entitas. ISA juga mewajibkan auditor menilai, menggunakan hasil penilaiannya, dan mengkomunikasikan kelemahan lingkungan dan sistem pengendalian internal.

7. *Those Charged with Governance* (Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola)

Komunikasi dua arah yang efektif antara auditor dan TCWG merupakan unsur penting dalam audit (Tuanakotta, 2015:541). Hal ini memungkinkan auditor untuk memngkomunikasikan hal-hal yang wajib dikomunikasikan dan hal-hal lain. Hal tersebut juga memungkinkan TCWG memberi kepada auditor informasi yang (tanpa komunikasi ini) tidak akan tersedia. Informasi tersebut bermanfaat bagi auditor dalam merencanakan audit dan mengevaluasi hasilnya.

Penjabaran dari *International Standards on Auditing* (ISA) yang tertuang dalam *IAASB Handbook ISA* tahun 2015, adalah sebagai berikut:

1. 200-299: Prinsip-prinsip Umum dan Tanggung jawab

- ISA 200: Tujuan keseluruhan auditor dan pelaksanaan suatu audit berdasarkan standar internasional dalam audit

ISA ini mengandung tujuan, persyaratan dan aplikasi serta penjelasan lainnya yang dirancang untuk mendukung auditor dalam memperoleh jaminan yang wajar. ISA mengharuskan auditor melakukan penilaian profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional di sepanjang perencanaan dan pelaksanaan audit.

- ISA 210: Persetujuan atas syarat-syarat perikatan audit

ISA 210 berhubungan dengan tanggung jawab auditor dalam menyetujui ketentuan perikatan audit dengan manajemen dan, jika diperlukan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

- ISA 220: Pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan

ISA 220 ini berhubungan dengan tanggung jawab spesifik auditor terkait prosedur pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan.

- ISA 230: Dokumentasi audit

ISA 230 ini membahas tanggung jawab auditor untuk menyiapkan dokumentasi audit untuk audit atas laporan keuangan.

- ISA 240: Tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan

ISA 240 ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor yang terkait dengan kecurangan dalam audit atas laporan keuangan.

- ISA 250: Pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit laporan keuangan

ISA 250 ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan undang-undang dan peraturan dalam audit atas laporan keuangan.

- ISA 260: Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
ISA 260 ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk berkomunikasi dengan TCWG dalam audit atas laporan keuangan.

- ISA 265: Pengkomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen

ISA 265 berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk berkomunikasi secara tepat dengan TCWG dan manajemen atas defisiensi dalam pengendalian internal yang auditor identifikasi dalam audit atas laporan keuangan. Auditor diharuskan untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit ketika mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material.

2. 300-450: Penilaian Risiko dan Respons Terhadap Risiko yang Telah Dinilai

- 1) ISA 300: Perencanaan suatu audit atas laporan keuangan

ISA 300 berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk merencanakan audit atas laporan keuangan.

- 2) ISA 315: Pengidentifikasi dan penilaian risiko salah saji material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya

ISA 315 berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, melalui pemahaman entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas.

- 3) ISA 320: Materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit

ISA 320 ini membahas tanggung jawab auditor untuk menerapkan konsep materialitas dalam perencanaan dan melakukan audit atas laporan keuangan.

- 4) ISA 330: Respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai

ISA 330 ini membahas tanggung jawab auditor untuk merancang dan menerapkan respon terhadap risiko salah saji material yang diidentifikasi dan dinilai oleh auditor sesuai dengan ISA 315 dalam audit atas laporan keuangan.

- 5) ISA 402: Pertimbangan audit terkait dengan entitas jasa

ISA 402 ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat ketika entitas pengguna beroperasi satu atau lebih organisasi jasa.

- 6) ISA 450: Pengevaluasian atas salah saji yang diidentifikasi selama audit

ISA 450 ini membahas tanggung jawab auditor untuk mengevaluasi pengaruh salah saji yang teridentifikasi pada audit dan jika ada, salah saji yang tidak dikoreksi pada laporan keuangan.

3. 500-580: Bukti Audit

- 1) ISA 500: Bukti audit

ISA 500 menjelaskan apa yang merupakan bukti audit dalam audit atas laporan keuangan, dan berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan yang masuk akal untuk mendasari opini auditor.

- 2) ISA 501: Bukti audit – pertimbangan spesifik atas unsur pilihan

ISA 501 berkaitan dengan pertimbangan khusus oleh auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sesuai dengan ISA 330, ISA 500 dan ISA terkait lainnya dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu dari inventarisasi, litigasi dan klaim yang melibatkan entitas, dan segmen informasi dalam audit keuangan pernyataan.

- 3) ISA 505: Konfirmasi eksternal

ISA 505 ini berkaitan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal auditor untuk mendapatkan bukti audit dengan persyaratan ISA 330 dan ISA 500.

- 4) ISA 510: Perikatan audit tahun pertama – saldo awal

ISA 510 berkaitan dengan tanggung jawab auditor terkait dengan saldo awal dalam perikatan audit awal.

- 5) ISA 520: Prosedur analitis

ISA 520 berkaitan dengan penggunaan prosedur analitik oleh auditor sebagai prosedur substantif (prosedur analitis substantif). Ini juga berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk melakukan prosedur analitik dekat akhir audit yang membantu auditor ketika membentuk suatu kesimpulan keseluruhan pada laporan keuangan.

- 6) ISA 530: *Sampling* audit

ISA 530 berlaku ketika auditor telah memutuskan untuk menggunakan sampling audit dalam melakukan prosedur audit.

Ini berkaitan dengan penggunaan auditor dari pengambilan sampel statistik dan non-statistik ketika merancang dan memilih sampel audit, melakukan tes kontrol dan tes rincian, dan mengevaluasi hasil sampel.

- 7) ISA 540: Audit atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar, dan pengungkapan yang bersangkutan

ISA 540 berkaitan dengan tanggung jawab auditor yang sesuai dengan estimasi akuntansi, termasuk estimasi nilai wajar akuntansi, dan pengungkapan terkait dalam audit atas laporan keuangan.

- 8) ISA 550: Pihak berelasi

ISA 550 berkaitan dengan tanggung jawab auditor terkait dengan hubungan dan transaksi pihak terkait dalam audit atas laporan keuangan.

- 9) ISA 560: Peristiwa kemudian

ISA 560 berkaitan dengan tanggung jawab auditor terkait peristiwa kemudian dalam audit atas laporan keuangan.

- 10) ISA 570: Kelangsungan usaha

ISA 570 berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam mengaudit laporan keuangan terkait penggunaan manajemen atas asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan.

- 11) ISA 580: Representasi tertulis

ISA 580 membahas tanggung jawab auditor untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan apabila diperlukan, TCWG dalam audit atas laporan keuangan.

4. 600-620: Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain

- 1) ISA 600: Pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan grup (termasuk pekerjaan auditor komponen)

ISA 600 berlaku untuk audit grup. ISA ini berkaitan dengan pertimbangan khusus yang berlaku untuk audit kelompok, khususnya yang melibatkan audit komponen.

- 2) ISA 610: Penggunaan pekerjaan auditor internal

ISA 610 berhubungan dengan tanggung jawab auditor eksternal jika menggunakan pekerjaan kontrol internal. Ini termasuk menggunakan pekerjaan fungsi audit internal dalam memperoleh bukti audit dan menggunakan auditor internal untuk

memberikan bantuan langsung di bawah arahan, pengawasan dan peninjauan auditor eksternal.

3) ISA 620: Penggunaan pekerjaan seorang pakar auditor

ISA 620 berkaitan dengan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan pekerjaan individu atau organisasi dalam bidang keahlian selain akuntansi atau audit, ketika pekerjaan itu digunakan untuk membantu auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat.

5. 700-720: Kesimpulan Audit dan Pelaporan

1) ISA 700: Perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan

ISA 700 membahas tanggung jawab auditor untuk membentuk opini atas laporan keuangan. Standar ini juga berkaitan dengan bentuk dan isi laporan auditor yang dikeluarkan sebagai hasil dari audit laporan keuangan.

2) ISA 705: Modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen

ISA 705 membahas tanggung jawab auditor untuk mengeluarkan laporan yang sesuai dalam keadaan ketika, dalam membentuk opini sesuai dengan ISA 700, auditor menyimpulkan bahwa modifikasi terhadap pendapat auditor atas laporan keuangan diperlukan.

3) ISA 706: Paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor independen

ISA 706 membahas komunikasi tambahan dalam laporan auditor ketika auditor menganggap perlu untuk menarik perhatian pengguna terhadap suatu masalah atau hal-hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang sangat penting sehingga bagi pemahaman pengguna atas laporan keuangan; atau untuk menarik perhatian pengguna untuk masalah atau hal lain selain yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang relevan dengan pemahaman pengguna tentang audit, tanggung jawab auditor atau laporan auditor.

4) ISA 710: Informasi komparatif angka korespondensi dan laporan keuangan komparatif

ISA 710 berkaitan dengan tanggung jawab auditor terkait dengan informasi komparatif dalam audit atas laporan keuangan.

Ketika laporan keuangan periode sebelumnya telah diaudit oleh auditor pendahulu atau tidak diaudit, persyaratan dan panduan dalam ISA 510 tentang saldo awal juga berlaku

- 5) ISA 720: Tanggung jawab auditor atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan yang telah diaudit

ISA 720 berkaitan dengan tanggung jawab auditor terkait dengan informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit dan laporan auditor di dalamnya. Dengan tidak adanya persyaratan yang terpisah dalam keadaan tertentu dari perikatan, pendapat auditor tidak mencakup informasi lain dan auditor tidak memiliki tanggung jawab khusus untuk menentukan apakah informasi lain dinyatakan dengan benar.

6. 800-810: Area-Area Khusus

- 1) ISA 800: Pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus

ISA 800 membahas pertimbangan khusus dalam penerapan ISA tersebut untuk mengaudit laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka tujuan khusus.

- 2) ISA 805: Pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan tunggal dan unsur, akun atau pos spesifik dalam suatu laporan keuangan

ISA 805 berkaitan dengan pertimbangan khusus dalam penerapan ISA tersebut untuk mengaudit laporan keuangan tunggal atau elemen, akun atau item tertentu dari laporan keuangan.

- 3) ISA 810: Perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan.

ISA 810 berkaitan dengan tanggung jawab auditor terkait dengan keterlibatan untuk melaporkan ringkasan laporan keuangan yang berasal dari laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan ISA oleh auditor yang sama.

Sebagai perbandingan, adapun susunan SPAP terbaru yang didapatkan dari laman IAPI (yang diakses pada tanggal 17 Januari 2019, pukul 09.58 WIB), yaitu:

- 1) SA 200: Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit
- 2) SA 210: Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit
- 3) SA 220: Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan

- 4) SA 230: Dokumentasi Audit
- 5) SA 240: Tanggung Jawab Auditor terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan
- 6) SA 250: Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan
- 7) SA 260: Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
- 8) SA 265: Pengkomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola dan Manajemen
- 9) SA 300: Perencanaan Audit atas Laporan Keuangan
- 10) SA 315: Pengidentifikasi dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya
- 11) SA 320: Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit
- 12) SA 330: Respon Auditor terhadap Risiko yang Telah Diambil
- 13) SA 402: Pertimbangan Audit Terkait dengan Entitas yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa
- 14) SA 450: Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit
- 15) SA 500: Bukti Audit
- 16) SA 501: Bukti Audit – Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan
- 17) SA 505: Konfirmasi Eksternal
- 18) SA 510: Perikatan Audit Tahun Pertama – Saldo Awal
- 19) SA 520: Prosedur Analitis
- 20) SA 530: Sampling Audit
- 21) SA 540: Audit Atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, dan Pengungkapan yang Bersangkutan
- 22) SA 550: Pihak Berelasi
- 23) SA 560: Peristiwa Kemudian
- 24) SA 570: Kelangsungan Usaha
- 25) SA 580: Representasi Tertulis
- 26) SA 600: Pertimbangan Khusus Audit atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)
- 27) SA 610: Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
- 28) SA 620: Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor

- 29) SA 700: Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
- 30) SA 705: Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen
- 31) SA 706: Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor Independen
- 32) SA 710: Informasi Komparatif Angka Koresponding dan Laporan Keuangan Komparatif
- 33) SA 720: Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Audit
- 34) SA 800: Pertimbangan Khusus Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus
- 35) SA 805: Pertimbangan Khusus Audit atas Laporan Keuangan Tunggal dan Suatu Unsur, Akun, atau Pos Tertentu dalam Laporan Keuangan
- 36) SA 810: Perikatan untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan Indonesia sendiri baru mengadopsi ISA pada tahun 2013. ISA yang diadopsi pada 2013 ini didasarkan pada *Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncement* tahun 2010. Dapat dicermati bahwa susunan SPAP saat ini sebagaimana yang termuat dalam laman IAPI sama dengan susunan yang ada pada standar audit dalam *Handbook* ISA yang diterbitkan dan dimutakhirkan oleh IAASB pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwasanya penelitian ini bisa menjadi cerminan mengenai kepatuhan pada SPAP terbaru yang berbasis risiko setelah mengadopsi ISA dalam standarnya.

BAB V

PROSEDUR AUDIT

5.1 Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan ketiga menyebutkan beberapa prosedur audit yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti audit. Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit yang disebutkan dalam standart tersebut meliputi (Mulyadi, 2002) :

1. Inspeksi

Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Prosedur audit ini banyak dilakukan oleh auditor. Dengan melakukan inspeksi terhadap sebuah dokumen, auditor akan dapat menentukan keaslian dokumen tersebut.

2. Pengamatan

Pengamatan merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Objek yang diamati auditor adalah karyawan, prosedur, dan proses.

3. Permintaan Keterangan

Permintaan keterangan merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan dari prosedur ini adalah bukti lisan dan bukti dokumenter.

4. Konfirmasi

Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas.

Disamping auditor memakai prosedur audit yang disebutkan dalam standart tersebut, auditor melaksanakan berbagai prosedur audit lainnya untuk mengumpulkan bukti audit yang akan dipakai sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Prosedur audit ini sangat diperlukan bagi asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif (Malone dan Roberts, 1996) dalam Suryanita (2007). Kualitas dari auditor dapat diketahui dari seberapa jauh auditor menjalankan prosedur-prosedur audit yang tercantum dalam program audit.

Generally Accepted Audit Standards (GAAS) yang merupakan standart audit baku merinci prosedur audit sebagai berikut (Cushing and Loebbecke in AAA, 1986) dalam Elen, *et al* (2001):

1. Kegiatan pendahuluan (Pre-engagement Activities) terdiri dari :
 - a. Menerima atau menolak klien baru
 - b. Membuat jangka waktu perjanjian
 - c. Menetapkan staf audit
2. Aktivitas perencanaan (Planning activities), terdiri dari 4 langkah, yaitu :
 - a. Pemahaman tentang bisnis klien, dalam langkah ini auditor harus melakukan:
 - 1) Persiapan evaluasi analitik
 - 2) Menaksir resiko
 - b. Penaksiran atas materialitas
 - c. Mengevaluasi akuntansi pengendalian intern, dilakukan melalui 2 tahap yaitu :
 - 1) Tahap awal
 - 2) Tahap pelengkap
 - d. Mengembangkan perencanaan audit secara menyeluruh :
 - 1) Menjelaskan kepercayaan yang optimal terhadap pengendalian intern
 - 2) Merancang prosedur compliance test
 - 3) Merancang prosedur substantif
 - 4) Pencatatan program audit
3. Kegiatan pengujian kepatuhan, dilakukan melalui 2 langkah, yaitu:
 - a. Melakukan pengujian
 - b. Melakukan evaluasi akhir terhadap pengendalian intern, dengan cara :
 - 1) Melakukan evaluasi
 - 2) Modifikasi rencana audit
4. Kegiatan pengujian substantif, dilakukan dengan 5 langkah yaitu :
 - a. Melakukan pengujian substantive dari transaksi
 - b. Melakukan prosedur pemeriksaan analitik
 - c. Memeriksa secara detil terhadap pengujian atas saldo
 - d. Prosedur pemeriksaan post balance sheets
 - e. Memeriksa hasil dari prosedur substantif, dengan cara :
 - 1) Penemuan agregatif

- 2) Melakukan evaluasi
- 3) Modifikasi perencanaan audit
- f. or harus memberikan penjelasan kepada;
 - 1) Manajemen
 - 2) Pengacara
 - 3) Lainnya
- 5. Kegiatan merancang opini dan laporan, dilakukan melalui 4 langkah, yaitu:
 - a. Mengevaluasi laporan keuangan
 - b. Mengevaluasi hasil audit
 - c. Perumusan opini
 - d. Draft dan menerbitkan laporan
- 6. Kegiatan berkelanjutan, dilakukan melalui 6 langkah, yaitu :
 - a. Mengadakan pengawasan terhadap pengujian
 - b. Evaluasi pekerjaan asisten
 - c. Mempertimbangkan kelayakan hubungan dengan klien
 - d. Melakukan komunikasi khusus yang diperlukan, mengenai hal berikut :
 - 1) Kelemahan yang material dalam pengendalian intern
 - 2) Kesalahan yang bersifat material
 - 3) Kegiatan illegal oleh klien
 - e. Melakukan konsultasi dengan pihak yang berkompeten tentang masalah- masalah khusus
 - f. Merancang dokumen kerja, memutuskan dan menyimpulkan dalam kertas kerja yang tepat
- 1) Dalam penelitian ini prosedur audit yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Standart Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang menurut Heriningsih (2002) mudah untuk dilakukan praktik penghentian premature prosedur audit. Prosedur tersebut adalah :
 - 2) Pemahaman bisnis dan industri klien (PSA No.5 2001)
 - 3) Pertimbangan pengendalian internal (PSA No.69 2001)
 - 4) *Review* kinerja internal auditor klien (PSA No.33 2001)
 - 5) Informasi asersi manajemen (PSA No. 07 2001)
 - 6) Prosedur analitik (PSA No.22 2001)
 - 7) Proses konfirmasi (PSA No.07 2001)
 - 8) Representasi manajemen (PSA No.17 2001)

- 9) Pengujian pengendalian teknik audit berbantu komputer (PSA No. 59 2001)
- 10) Sampling audit (PSA No.26 2001)
- 11) Perhitungan fisik persediaan dan kas (PSA No.07 2001)

5.2 Perilaku *Premature Sign Off*

Sesuai dengan standar auditing (IAI, 2001) bahwa untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas maka auditor harus melaksanakan beberapa prosedur audit. Prosedur audit merupakan serangkaian langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan audit.

Dalam konteks auditing, manipulasi akan dilakukan dalam bentuk perilaku disfungsional. Perilaku ini adalah alat bagi auditor untuk memanipulasi proses audit dalam upaya mencapai tujuan kinerja individual. Pengurangan kualitas audit yang dilakukan dari kegiatan ini mungkin dipandang sebagai pengorbanan bagi individu untuk bertahan dalam lingkungan audit (Donnelly *et al.*, 2003).

SAS No 82 dalam Donnelly et al (2003) menyatakan bahwa sikap auditor menerima perilaku disfungsional merupakan indikator dari perilaku disfungsional aktual. *Dysfunctional Audit Behavior* merupakan reaksi terhadap lingkungan (Donnelly et al, 2003). Beberapa perilaku disfungsional yang membahayakan kualitas audit yaitu: *Underreporting of time, premature sign off, altering/ replacement of audit procedure.*

Premature Sign Off (PMSO) merupakan suatu keadaan yang menunjukkan auditor menghentikan satu atau beberapa langkah audit yang diperlukan dalam prosedur audit tanpa menggantikan dengan langkah yang lain (Marxen, 1990 dalam Sososutikno, 2003). PMSO ini secara langsung mempengaruhi kualitas audit dan melanggar standar profesional. Graham (1985) dalam Shapero *et al.* (2003) menyimpulkan bahwa kegagalan audit sering disebabkan karena penghapusan prosedur audit yang penting dari pada prosedur audit tidak dilakukan secara menadai.

Samsul Ulum (2005) menyatakan bahwa perilaku *Prematur Sign-Off Audit Procedures* timbul karena rendahnya orientasi etis para auditor (sifat relativisme yang tinggi). Chan dan Leung (2006); Leung dan Cooper (2005) menyatakan bahwa perilaku etis yang rendah disebabkan oleh orientasi etis individu yang rendah sehingga para auditor tidak berperilaku etis dalam menjalankan profesinya.

5.3 *Time Pressure*

Anggaran waktu merupakan hal yang sangat penting bagi semua AKP karena menyediakan dasar untuk memperkirakan biaya audit, pengalokasian staf ke dalam pekerjaan audit, dan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja auditor (Waggoner dan Cashell, 1991) dalam Basuki *et al* (2006) serta sangat diperlukan bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya untuk dapat memenuhi permintaan klien secara tepat waktu dan menjadi salah satu kunci keberhasilan karir auditor di masa depan. Oleh karena itu, selalu ada tekanan bagi auditor untuk menyelesaikan audit dalam waktu yang telah dianggarkan. Auditor yang menyelesaikan tugas melebihi waktu normal yang telah dianggarkan cenderung dinilai memiliki kinerja yang buruk oleh atasannya atau sulit mendapatkan promosi. Kriteria untuk memperoleh peringkat yang baik adalah pencapaian anggaran waktu. Akhir-akhir ini tuntutan tersebut semakin besar dan menimbulkan *time pressure*.

Time Pressure memiliki dua dimensi yaitu *time budget pressure* (keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat) dan *time deadline pressure* (kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya) (Heriningsih, 2001).

Fungsi anggaran dalam Kantor Akuntan Publik adalah sebagai dasar estimasi biaya audit, alokasi staf ke masing-masing pekerjaan dan evaluasi kinerja staf auditor (Waggoner dan Chasell, 1991) dalam Suryanita, *et al* (2007). *Time Pressure* yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. Keberadaan *time pressure* ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya / sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan prosedur audit seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila prosedur audit dilakukan dalam kondisi tanpa *time pressure*. Agar menepati anggaran waktu yang telah ditetapkan, ada kemungkinan bagi auditor untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur audit bahkan pemberhentian prosedur audit.

5.4 Risiko Audit

Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material (SA Seksi 312). Saji material bisa terjadi karena adanya kesalahan (*error*) atau kecurangan (*fraud*). *Error* merupakan kesalahan yang tidak disengaja (*unintentional mistakes*) sedangkan *Fraud* merupakan kecurangan yang disengaja, bisa dilakukan oleh pegawai perusahaan (misalnya penyalahgunaan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi) atau oleh manajemen dalam bentuk rekayasa laporan keuangan.

Risiko audit, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu (Mulyadi, 2001) :

a. Risiko audit keseluruhan (*Overall audit risk*)

Pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan. Yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, padahal kenyataannya laporan keuangan tersebut berisi salah saji material.

b. Risiko audit individual

Karena audit mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual, risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun yang berkaitan.

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam risiko audit adalah :

a. Risiko bawaan

Adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait.

b. Risiko pengendalian

Adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern suatu entitas. Risiko ini ditentukan oleh efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian intern untuk mencapai tujuan umum pengendalian intern yang relevan dengan audit atas laporan keuangan entitas.

c. Risiko deteksi

Adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko ini timbul sebagian karena ketidak paastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi dan sebagian lagi karena ketidak pastian lain yang ada, walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa 100%.

Dalam penelitian ini risiko audit yang dimaksud adalah risiko deteksi. Karena seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa risiko ini menyatakan suatu ketidak pastian yang dihadapi auditor dimana kemungkinan bahan bukti yang telah dikumpulkan oleh auditor tidak mampu untuk mendeteksi adanya salah saji yang material.

5.5 Materialitas

Proses audit atas laporan keuangan dilaksanakan oleh auditor melalui empat tahap utama yaitu: perencanaan, pemahaman, pengujian struktur pengendalian intern serta penerbitan laporan audit (Mulyadi, 2002).

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA seksi 312 materialitas merupakan besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut.

FASB (*Financial Accounting Standard Board*) menjelaskan konsep materialitas sebagai penghilangan atau salah saji suatu item dalam laporan keuangan adalah material jika dalam keadaan tertentu besarnya item tersebut mungkin menyebabkan pertimbangan orang yang reasonable berdasarkan laporan keuangan tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh adanya pencatuman atau peniadaan informasi akuntansi tersebut.

Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut (Sukrisno, 1996:100) dalam Suryanita, *et al* (2007).

Dari definisi diatas konsep materialitas dapat digunakan 3 tingkatan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat antara lain :

1. Jumlah yang tidak material, jika terdapat salah saji dalam aporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan,
2. Jumlahnya material, tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan,
3. Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan.

Standar yang tinggi dalam praktik akuntansi akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep materialitas. Pedoman materialitas yang beralasan, yang diyakini oleh sebagian besar anggota profesi akuntan adalah standar yang berkaitan dengan informasi laporan keuangan bagi para pemakai, akuntan harus menentukan berdasarkan pertimbangannya tentang besarnya sesuatu/informasi yang dikatakan material.

Dalam penetapan materialitas ada lima langkah yang harus dilakukan antara lain (Mulyadi, 2001) :

1. Menentukan pertimbangan awal mengenai materialitas
2. Alokasikan pertimbangan awal mengenai materialitas kedalam segmen
3. Estimasi total salah saji kedalam segmen
4. Estimasi salah saji gabungan
5. Bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal mengenai materialitas.

Dalam sebuah perusahaan, dimana hasil dari suatu operasi perusahaan akan dituangkan dalam sebuah laporan yaitu laporan keuangan yang terdiri dari sebuah laporan neraca, laba rugi, perubahan modal, serta laporan arus kas. Laporan tersebut penting sekali dalam suatu audit atau proses atestasi lainnya karena laporan menginformasikan pemakai informasi mengenai apa yang akan dilakukan auditor dan kesimpulan yang di perolehnya (Palestine, 2005).

Materialitas merupakan dasar penerapan standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas mempunyai pengaruh yang mencakup semua

aspek audit dalam audit atas laporan keuangan. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain, bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Auditor tidak dapat memberikan jaminan karena ia tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkaskan, digolongkan, dan dikompilasi secara semestinya kedalam laporan keuangan. Jika auditor diharuskan untuk memberikan jaminan mengenai keakuratan laporan keuangan auditor, hal ini tidak mungkin dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat yang dihasilkan. Disamping itu, tidaklah mungkin seseorang menyatakan keakuratan laporan keuangan (yang berarti ketepatan semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan), mengingat bahwa laporan keuangan sendiri bersifat pendapat, estimasi, dan pertimbangan dalam penyusunannya, yang sering kali pendapat, estimasi, dan pertimbangan tersebut tidak tepat atau akurat seratus persen. Oleh karena itu, auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus bersedia menerima beberapa jumlah kekeliruan kecil. Konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut (Mulyadi, 2002).

Konsep materialitas adalah faktor yang penting dalam mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, jika ada salah saji yang tidak material dalam laporan keuangan suatu entitas dan pengaruhnya terhadap periode selanjutnya diperkirakan tidak terlalu berarti, maka dapatlah dikeluarkan suatu laporan wajar tanpa pengecualian. Keadaan akan berbeda jika jumlah sedemikian besar sehingga dapat menimbulkan pengaruh yang material pada laporan keuangan secara keseluruhan definisi dari material dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dianggap material jika pengetahuan atas dasar salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang rasional (Palestine, 2005).

Dalam menentukan sifat, saat dan luas prosedur audit yang akan diterapkan, auditor harus merancang suatu prosedur audit yang dapat memberikan keyakinan memadai untuk dapat mendeteksi adanya salah

saji yang material (Arens dan Loebbecke, 2000) dalam Suryanita,*et al* (2007). Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif (berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah saldo tertentu) dan kualitatif (berkaitan dengan penyebab salah saji) (Heriningsih, 2001).

Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas. Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit dan kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Auditor harus mempertimbangkan dengan baik penaksiran materialitas pada tahap perencanaan audit. Jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu rendah auditor akan mengkonsumsi waktu dan usaha yang sebenarnya tidak diperlukan. Sebaliknya, jika auditor menentukan jumlah materialitas yang terlalu tinggi, auditor akan mengabaikan salah saji signifikan sehingga ia memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang berisi salah saji material (Mulyadi, 2002).

Laporan keuangan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kekurangan yang dampaknya, secara individual atau secara gabungan, sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dalam keadaan ini, salah saji dapat terjadi sebagai akibat penerapan secara keliru prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, penyimpangan dari fakta, atau penghilangan informasi yang diperlukan (Mulyadi, 2002).

Beberapa penelitian tentang pertimbangan tingkat materialitas berfokus pada penemuan tentang jumlah konsisten yang ada diantara para profesional dalam membuat pertimbangan tingkat materialitas. Ada juga penelitian yang dilakukan, yang berkaitan dengan materialitas memeriksa pengaruh satu variabel (ukuran suatu item seperti prosentase pendapatan) dalam pertimbangan materialitas.

5.6 Prosedur *Review* dan Kontrol Kualitas oleh Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik perlu melakukan prosedur *review* (prosedur pemeriksaan) untuk mengontrol kemungkinan terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit yang dilakukan oleh auditornya (Waggoner dan Cashell, 1991) dalam Suryanita *et al* (2007).

Prosedur *review* merupakan proses memeriksa / meninjau ulang hal / pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah menyelesaikan tugasnya, padahal tugas yang disyaratkan tersebut gagal dilakukan. Prosedur ini berperan dalam memastikan bahwa bukti pendukung telah lengkap dan juga melibatkan pertimbangan ketika terdapat sugesti bahwa penghentian prematur telah terjadi. Sugesti bisa muncul, misalnya jika ada auditor yang selalu memenuhi target (baik waktu maupun anggaran) dan tampak memiliki banyak waktu luang. Heriyanto (2002) dalam Suryanita *et al* (2007) mendefinisikan prosedur *review* sebagai “pemeriksaan terhadap kertas kerja yang dilakukan oleh auditor pada level tertentu”. Fokus dari prosedur *review* ini terutama pada permasalahan yang terkait dengan pemberian opini.

Berbeda dengan prosedur *review* yang berfokus pada pemberian opini, kontrol kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur audit sesuai standar auditing. Kantor Akuntan Publik (KAP) harus memiliki kebijakan yang dapat memonitor praktik yang berjalan di KAP itu sendiri (Messier, 2000). Keberadaan suatu sistem kontrol kualitas akan membantu sebuah KAP untuk memastikan bahwa standar profesional telah dijalankan dengan semestinya di dalam praktik. Terdapat 5 elemen dari kontrol kualitas yaitu independensi, integritas dan obyektivitas, manajemen personalia, penerimaan dan keberlanjutan serta perjanjian dengan klien, performa yang menjanjikan serta *monitoring* (Messier, 2000) dalam Suryanita *et al* (2007).

Sistem kontrol seperti telah diteliti dalam literatur akuntansi, biasanya didasarkan pada *cybernetic model* yang mana standart kinerja (*budget, goal, target*) dan pengukuran kinerja diperbandingkan sebagai dasar untuk kegiatan koreksi dan evaluasi kinerja. Tiga komponen penting dari sistem kontrol berbasis- kinerja adalah proses penyusunan standart (misalnya: partisipasi, *imposition*), *standard tightness* (misalnya: *goal difficulty, budgetary slack*), dan insentif berbasis standart (misalnya: bonus untuk setiap unit yang diukur kinerjanya melebihi standar kinerja yang telah ditetapkan). Tiga komponen sistem kontrol ini saling berinteraksi/berhubungan (Demski & Feltham, 1978).\

5.7 Locus of Control Auditor

Perilaku disfungsional audit dapat disebabkan oleh faktor karakteristik personal dari auditor (faktor internal) serta faktor

situasional saat melakukan audit (faktor eksternal). Karakteristik personal yang mempengaruhi penerimaan perilaku disfungsional diantaranya *locus of control*.

Locus of control mempengaruhi penerimaan perilaku disfungsional audit maupun perilaku disfungsional audit secara actual, kepuasan kerja, komitmen organisasional dan *tuenover intention* (Reed *et al*; 1994 dalam Puji, 2005; Donnelly *et al*, 2003) dalam (Indri Kartika *et al*, 2007).

Locus of control didefinisikan sebagai persepsi seseorang tentang sumber nasibnya (Robbins, 2003). *Locus of control* adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia merasa dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya (Rotter, 1966). Konsep *locus of control* memiliki latar belakang teoritis dalam teori pembelajaran sosial.

Teori *locus of control* menggolongkan individu apakah termasuk dalam *locus* internal atau eksternal. Rotter (1990) dalam (Hyatt & Prawitt, 2001) menyatakan bahwa *locus of control* baik internal maupun eksternal merupakan tingkatan dimana seorang individu berharap bahwa *reinforcement* atau hasil dari perilaku mereka tergantung pada perilaku mereka sendiri atau karakteristik personal mereka. Mereka yang yakin dapat mengendalikan tujuan mereka dikatakan memiliki *internal locus of control*, sedangkan yang memandang hidup mereka dikendalikan oleh kekuatan pihak luar disebut memiliki *eksternal locus of control* (Robbins, 1996) dalam (Indri Kartika *et al*, 2007).

Locus of control berperan dalam motivasi, *locus of control* yang berbeda bias mencerminkan motivasi yang berbeda dan kinerja yang berbeda. Internal akan cenderung lebih sukses dalam karier dari pada eksternal, mereka cenderung mempunyai level kerja yang lebih tinggi, promosi yang lebih cepat dan mendapatkan uang yang lebih. Sebagai tambahan, internal dilaporkan memiliki kepuasan yang lebih tinggi dengan pekerjaan mereka dan terlihat lebih mampu menahan stres daripada eksternal (Baron & Greenberg, 1990 dalam Puji, 2005) dalam (Indri Kartika *et al*, 2007). Penelitian Rotter, (1990) dalam Hyatt & Prawitt, (2001) menjelaskan bahwa eksternal secara umum berkinerja lebih baik ketika pengendalian dipaksakan atas mereka (Indri Kartika *et al*, 2007).

Hyatt dan Prawitt (2001) membuktikan bahwa *locus of control* dapat memberikan pengaruh pada kinerja audit terhadap auditor internal dan juga pihak auditor eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina,R, Pratomo (2019). “Pengaruh *Fraud Pentagon* Dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan”. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)| Volume 3 No. 1 Januari – April 2019*.
- Aprilia (2017). “Analisis Pengaruh *Fraud Pentagon* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model Pada Perusahaan Yang Menerapkan *Asean Corporate Governance Scorecard*”. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)Vol.9 / No.1 | 2017*
- Arisandi,D, Verawaty (2017). “*Fraud Pentagon* Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Keuangan Dan Perbankan Di Indonesia”.
- Bawekes,H, Simanjuntak, Daat (2018). “ Pengujian Teori *Fraud Pentagon* Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*”. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 13, Nomor 1, Mei 2018: 114–134*
- Bayagub,A, Zulfa, Mustoffa (2018). “Analisis Elemen-Elemen *Fraud Pentagon* Sebagai Determinan *Fraudulent Financial Reporting*”. *ISSN: 2598- 7496 E-ISSN:2599-0578*.
- Damayani,F, Wahyudi, Yuniatie (2017). “Pengaruh *Fraud Pentagon* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016”.
- Devy,K, Wahyuni, Sulindawat (2017). “Pengaruh *Frequent Number of CEO’s*, Pergantian Direksi Perusahaan Dan *Eksternal Pressure* Dalam mendeteksi *Fraudulent Financial Reporting*”. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)*
- Faradiza,S (2017), “*Fraud Pentagon* dan Kecurangan Laporan Keuangan”.
- Junardi, (2015).“Analisis Pengaruh *Fraud Pentagon* Terhadap *Fraudulent Financial Reporting* Dengan Menggunakan Model Altman”.
- Mukaromah,I, Budiwitjaksono (2021).” *Fraud Hexagon Theory* dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019”.

- Nasution,M, Suryani, Lestari (2019). “Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)”. *Volume 3 Nomor 3 Edisi Agustus 2019 (153-165)*
- Nisa,K, Oktafiana, Sari (2017). “Fraudulent Financial Statement Ditinjau Dari Model Fraud Pentagon Horwath”.
- Novita,N (2019). “Teori Fraud Pentagon dan Deteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan”. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO) – Vol 11 No 2 – Juli 2019 – Halaman 64-73*
- Saputra,A, Kusumaningrum (2017). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Frudent Financial Reporting Dengan Perspektif Fraud Pentagon Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 22, No.2, Juli 2017*
- Septriani,Y, Handayani (2018). “Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Pentagon”. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Bisnis Vol. 11, No. 1, Mei 2018, 11-23*
- Siddiq, F, Achyani, Zulfikar (2016). “Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Financial Fraud”. ISSN 2460-0784
- Ulfah,M, Nuraina, Wijaya (2017). “Pengaruh Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting (Studi Empiris Pada Perbankan Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI”. *Vol.5 No 1 Oktober 2017*
- Vivianita,A, Indudewi (2018). “Financial Statement Fraud Pada Perusahaan Pertambangan Yang Dipengaruhi Oleh Fraud Pentagon Theory”. *Dinamika Sosial Budaya, Vol 20, No. 1, Juni 2018, pp 1-15 p-ISSN:1410-9859& e-ISSN: 2580-8524*
- Zulfa,K, Bayagub (2016). “Analisis Elemen-Elemen Fraud Pentagon Sebagai Determinan Fraudulent Financial Reporting”.
- Sabatina,Y Bian (2021). “Analisis Pengaruh Deteksi Dini Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Gender sebagai Variabel Moderating”.
- Harman, S. A. (2019). Analisis Determinan Financial Statement Fraud Dengan Perspektif Fraud Pentagon (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga.*
- Kartikarini, N., & Sugiarto. (2016). Pengaruh Gender, Keahlian Dan

- Skeptisisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Studi Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Nisa, K., Oktafiana, N. F., & Permata Sari, S. (2019). Fraudulent Financial Statement Ditinjau Dari Model Fraud Pentagon Horwath. *Urecol*.
- Putri, I. G. A. E. P. P., Sulindawati, N. L. G. E., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Financial Targets Dan Ineffective Monitoring Terhadap Terjadinya Fraud (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Dana Pertiwi Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*.
- Sari, T. P., & Lestari, D. I. T. (2020). Analisis Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud : Prespektif Diamond Fraud Theory. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- Siddiq, F. R., & Suseno, A. E. (2019). Fraud Pentagon Theory Dalam Financial Statement Fraud Pada Perusahaan Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Jii) Periode 2014-2017 (Perspektif F-Score Model). *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*.
- Sumampow, J. E. O., Manaroinsong, J., & Sumual, F. M. (2021). Pengaruh Financial Stability & Financial Tergets Terhadap Financial Statement Fraud Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Property, Real Estate, & Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*.
- Arum, E. D. P., & Wahyudi, I. (2020). Fraudulent Financial Reporting Detection In Banking Sector: Evidence From Indonesia. *International Journal Of Psychosocial Rehabilitation*.
- Edi, E., & Victoria, E. (2018). Pembuktiaan *Fraud Triangle Theory* pada *Financial Report Quality*. *Jurnal Benefita*.
- Fadly, I., & Nazar, M. R. (2020). Analisis *Fraud Diamond* Terhadap *Fraudulent Financial Statement* (Studi Empiris Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek
- Utami, Y. D. (2019). *Fraud Pentagon* Dalam Mendeteksi Risiko Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur tahun 2016-2018. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*.